



AKMENIKA

Jurnal Akuntansi dan Manajemen

Dampak *Talent Management* terhadap *Employee Retention* pada *Millenials Workforce*

Murti Sumarni

Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Manajemen Pajak

Dewi Kusuma Wardani, Hany Nur Setiya Putri

Determinan Risk Taking Bank Perkreditan Rakyat Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Risal Rinofah, Ayu Laksita Widaresti, Noviani Desy Purbasari

Pengaruh *Celengan Padjeg* terhadap Kepatuhan WP Dengan Motivasi WP Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Di Wilayah Kerja KPP Wonosari)

Suyanto

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi (pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gunungkidul)

Putri Utami, Vidya Vitta Adhivinna

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta)

Teguh Erawati, Muhammad Firas Abdulhadi

Penerbit Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I, Sonosewu No.117 Yogyakarta 55182

Telp./Fax.(0274)376808, 373198, 372098

www.ekonomi.upy.ac.id/www.upy.ac.id



SUSUNAN DEWAN REDAKSI**PENANGGUNGJAWAB**

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta

PEMIMPIN REDAKSI

Adhi Prakosa, S.E., M.Sc

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rani Eka Diansari, M.Acc

REDAKSI

Dra. Tri Siwi Nugrahani, S.E., M.Si

Fitri Susilowati, S.E., M.Sc

Drs. Arif Sudaryana, M.Si.

Ahsan Sumantika, S.E., M.Sc

MITRA BESTARI

Dr. Suryanto, S.E., M.Si. (Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta).

Dr. Ruddy Tri Santoso, M.M., MAPPI (Cert.) (Universitas Surabaya).

Dr. Wahyu Widarjo, S.E., M.Si. (Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta).

Dr. Dekeng Setyo Budiarto, S.E., M.Si., Ak., CA (Universitas PGRI Yogyakarta)

DAFTAR ISI

- Dampak *Talent Management* terhadap *Employee Retention* pada *Millenials Workforce***
Murti Sumarni 1-10
- Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Manajemen Pajak**
Dewi Kusuma Wardani, Hany Nur Setiya Putri 11-25
- Determinan Risk Taking Bank Perkreditan Rakyat Di Daerah Istimewa Yogyakarta**
Risal Rinofah, Ayu Laksita Widaresti, Noviani Desy Purbasari 26-37
- Pengaruh *Celengan Padjeg* terhadap Kepatuhan WP Dengan Motivasi WP Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Di Wilayah Kerja KPP Wonosari)**
Suyanto 38-53
- Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi (pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gunungkidul)**
Putri Utami, Vidya Vitta Adhivinna 54-66
- Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta)**
Teguh Erawati, Muhammad Firas Abdulhadi 67-78

DAMPAK TALENT MANAGEMENT TERHADAP EMPLOYEE RETENTION PADA MILLENIALS WORKFORCE

Murti Sumarni

Universitas PGRI Yogyakarta
Jl. PGRI 1 Sonosewu No. 117, Yogyakarta
omamurti53@gmail.com

Abstract

The aim of this research was focused to determine the impact of Talent Management to Employee Retention in the case of Millenials Workforce. Previous research found that Human Resource Development Manager were dealing with Y Generation who had a unique work ethic, so it needed a different retention of employee. The reliability and validity test was conducted to 30 respondents and the result showed that all questions item were proven valid and reliable to be used in further research analysis. Populations in this research were the millennial employees. Questionnaire was used to collect the data in the amount of 60 respondents. This research used SPSS to analyze and the result of the linier regression analysis indicated that the Talent Management had a significant effect to Millenials Workforce Employee Retention.

Keyword: Talent Management, Millenials Workforce, Employee Retention

Latar Belakang

Pada tahun 2018 revolusi dalam bidang industri diperkirakan telah mencapai yang keempat. Revolusi Industri di Indonesia yang pertama adalah pada jaman Hindia-Belanda, ditandai dengan adanya *steam engine* atau mesin uap, kedua adalah pada saat otomotif mulai berkembang di Indonesia, dan yang ketiga adalah adanya otomatisasi sistem serta globalisasi. Revolusi Industri 4.0 direspon oleh Pemerintah Indonesia dengan meresmikan peta jalan atau *roadmap* yang disebut *Making Indonesia 4.0*, termasuk peluncuran bidang-bidang yang menjadi fokus pembangunan industri, yaitu makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil, *footwear*, dan kimia.

Revolusi ini dimulai sejak munculnya teknologi internet pada tahun 1990-an, dan semakin berkembang hingga saat ini, dan akhirnya muncullah ekonomi digital yang membuat lingkungan bisnis menjadi semakin dinamis karena akses terhadap informasi juga semakin mudah

(<https://finance.detik.com>, diakses pada tanggal 4 April 2018).

Tentunya Revolusi Industri 4.0 ini memberikan dampak yang sangat luas, utamanya bagi masyarakat dan pengelola bisnis. Pengelola bisnis dituntut untuk mampu mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai salah satu komponen utama dalam organisasi di tengah-tengah perkembangan industri yang sangat cepat dan penuh persaingan. Pengelolaan SDM menjadi fokus pemikiran bagi *manager* karena penanganan SDM yang tepat akan mampu meminimalkan *Turnover* yang sering menjadi masalah bagi *manager* pada kurun waktu satu dasawarsa terakhir ini.

Pada realitanya perekonomian telah dikendalikan oleh pengetahuan, pengetahuan global, dan modal intelektual. Modal intelektual menjadi sumber yang penting bagi organisasi untuk mencapai keuntungan kompetitifnya (Markos dan Sridevi, 2010), oleh karenanya *talent management* bukanlah menjadi suatu hal yang berlebihan untuk dilakukan

mengingat dampaknya bagi peningkatan produktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan yang stabil dari waktu ke waktu.

Talent management adalah suatu upaya dalam pengelolaan SDM demi menarik sekaligus mempertahankan *talented people* atau karyawan-karyawan yang berbakat sekaligus terdidik di perusahaan. Dilema perusahaan pada saat ini adalah dalam hal memformulasikan strategi dengan tujuan untuk menemukan *talented worker* dan melakukan *retention* untuk menggantikan *Baby Boomers* yang memasuki masa pensiun pada angkatan kerja saat ini (Oladapo, 2014).

Pekerja-pekerja yang berpendidikan sekaligus berbakat sangat dibutuhkan untuk efisiensi dan efektivitas organisasi. Kompetensi serta kualitas pekerja seperti ini dapat diperoleh dari Generasi Y, yang sering dikenal dengan *millennials*, dengan karakter-karakter unik seperti penguasaan yang tinggi terhadap teknologi informasi dan komunikasi, *multitasking*, kemampuan yang baik dalam bekerjasama, sekaligus kepercayaan diri yang sangat tinggi.

Ruang lingkup *talent management* terdiri dari lima kategori, yaitu rekrutmen untuk menentukan karyawan yang tepat, manajemen kinerja untuk menilai pekerjaan yang dihasilkan, ketepatan waktu rencana suksesi, ketepatan pemilihan tempat pelatihan dan pengembangan, serta retensi untuk menentukan kemampuan dan keahlian secara tepat melalui proses yang tergambar dalam Tabel 1 berikut ini (Oladapo, 2014):

Tabel 1. Proses *Talent Management*

ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS	EMPLOYEE
Recruitment	Right employees
Performance Management	Performing the right job

Succession Planning	Right time
Training and Development	Right place
Retention	Right skills and ability

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwasanya tiap komponen memiliki peran masing-masing, akan tetapi harus tetap dilihat sebagai satu paket utuh dalam penerapannya demi tercapainya keunggulan kompetitif perusahaan melalui pengelolaan SDM.

Pada lebih dari enam puluh tahun terakhir terdapat tiga generasi, yaitu *Baby Boomers Generation*, *Generation X*, dan *Generation Y*, yang sering dikenal dengan sebutan *Millennials*. Ketika Generasi Y ini masuk dalam dunia kerja, maka perilaku organisasi ikut berubah untuk menyesuaikan diri dengan adanya generasi baru tersebut, sehingga ketiga generasi tersebut dapat hidup berdampingan (Kaifi, et.al., 2012).

Baby Boomers adalah generasi yang lahir sebelum tahun 1965. Mereka membangun kehidupan setelah adanya Perang Dunia II, dicirikan dengan memiliki banyak anak, menganggap teknologi sebagai ‘artefak’, sering fokus pada hobinya, menyukai keseimbangan dalam hidup, dan masih memiliki banyak pilihan dalam pekerjaan (Rosenberg, 2009). Sedangkan *Generation X* adalah generasi yang lahir antara tahun 1965-1980 (Kane, 2012), dicirikan dengan sangat individualis, adaptif, tidak menyukai formalitas, fokus pada *outcome* daripada proses karena kesenjangan dalam kemampuan kerja dan tidak sabar, serta suka berterus terang (Salahuddin, 2010).

Generasi yang belum lama berada di dunia kerja adalah Generasi Y atau *Millennials* yaitu generasi yang lahir setelah tahun 1980. Generasi ini sangat terbuka, literasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi tinggi, sehingga karyawan

tipikal ini menjadi sebuah aset tersendiri bagi perusahaan karena sangat *familiar* dengan teknologi digital. Generasi ini skeptis terhadap komitmen jangka panjang, lebih menyukai pekerjaan dengan fleksibilitas tinggi, suka bekerja dengan tim, namun terkadang *overconfident*. *Manager* dari generasi ini memiliki lima nilai yaitu keamanan keluarga, kesehatan, kebebasan, penghargaan terhadap pribadinya, dan persahabatan yang sejati. Meskipun *millenials* memiliki keahlian tinggi dalam teknologi serta kemampuan *multitasking*, sayangnya generasi ini sangat kurang dalam hal kemampuan berkomunikasi secara *oral*, *written*, maupun secara interpersonal.

Dalam penelitian ini, *talent management* yang dimaksud adalah yang dilakukan terhadap *millenials* karena tentunya dengan beberapa karakter unik tersebut, memberikan suatu perbedaan *treatment* dalam *retention* bagi *millenials workforce*. Misalnya saja dengan karakter yang sangat terbuka, bebas, dan sangat sosial maka *attractive treatment* dengan menggunakan *reward* uang sudah bukan menjadi daya tarik utama *millenials*. Di sisi lain, *punishment* bisa saja justru menjadikan turunnya produktivitas yang akan berpengaruh juga pada *job satisfaction* dan *organizational commitment*.

Employee Retention yang didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan karyawan potensial yang dimiliki perusahaan untuk tetap loyal terhadap perusahaan (Sumarni, 2011). Retensi karyawan ini didasarkan pada keinginan untuk mempertahankan karyawan potensial yang memiliki kualitas dan keahlian tertentu sehingga dapat berada di perusahaan selama mungkin. Karyawan potensial merupakan modal intelektual yang sifatnya *intangible* sehingga tak ternilai bagi perusahaan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan perusahaan sejak rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan dilakukan, sangat besar, juga risiko

bocornya rahasia bisnis ke perusahaan lain, utamanya pesaing, sehingga retensi karyawan menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman pada *Talent Management* serta pengaruhnya terhadap *Employee Retention*. Hal ini menjadi suatu ketertarikan bagi peneliti sebab lingkungan kerja yang menjadi tujuan peneliti adalah angkatan kerja yang dinamis, tanpa batas, terkoneksi secara digital serta tidak menyukai batasan-batasan konvensional seperti yang selama ini telah kita ketahui, yaitu angkatan kerja *millennials* (*Millennials Workforce*). Berdasarkan ketertarikan inilah maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Dampak *Talent Management* terhadap *Employee Retention* pada *Millennials Workforce*”

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan adalah:

“Apakah *Talent Management* berpengaruh terhadap *Employee Retention* pada *Millennials Workforce*?”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai Dampak *Talent Management* terhadap *Employee Retention* adalah:

“Mengetahui pengaruh *Talent Management* terhadap *Employee Retention* pada *Millennials Worker*”

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: (1) Perusahaan, memberikan informasi empiris mengenai *Talent Management* dan dampaknya terhadap *Employee Retention* pada *millenials workforce* sehingga menimbulkan keterikatan secara emosional terhadap perusahaan yang dapat meminimalkan *Turnover Intention*; dan (2) Peneliti lain, menjadi salah satu rujukan atau referensi bagi peneliti lain, yang

berminat melakukan penelitian dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang *Human Capital* serta *Talent Management*.

Kajian Teori

Talent Management

Beberapa pakar mengemukakan bahwa karyawan yang bertalenta adalah karyawan yang berkompeten secara luar biasa dengan potensi yang tinggi yang secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan mereka berpendapat bahwa *talent management* (manajemen bakat) memberikan perhatian pada individu kunci yaitu orang-orang yang berkompeten yang nantinya akan berada di puncak (Smilansky, 2005).

Manajemen Bakat adalah implementasi dari strategi yang terintegrasi atau sistem yang didesain untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja dengan mengembangkan peningkatan proses dalam mengidentifikasi, memilih, merekrut, mengembangkan dan mempertahankan karyawan dengan memanfaatkan kemampuan dan bakat tertentu dalam memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan di masa depan (Lockwood, N. R., 2006). Manajemen bakat adalah cara pengelolaan bakat dalam organisasi secara efektif, perencanaan dan pengembangan suksesi di perusahaan, realisasi pengembangan diri karyawan secara maksimal dan pemanfaatan bakat secara optimal (Rampersad, 2006).

Mengidentifikasi, memilih, merekrut, mengembangkan dan mempertahankan karyawan merupakan lima fokus utama dalam manajemen bakat agar perusahaan mendapatkan keuntungan kompetitif, dan kebutuhan akan modal manusia (*human capital*) akan berlanjut pada manajemen bakat (Towers Perrin, 2003). Dari beberapa pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa manajemen bakat adalah suatu kegiatan yang bersifat strategis dalam upaya meningkatkan produktifitas melalui

optimalisasi karyawan yang memiliki bakat atau bertalenta.

Employee Retention

Salah satu pusat perhatian dari perusahaan pada saat ini adalah retensi karyawan (*employee retention*). Retensi karyawan merupakan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan karyawan potensial yang dimiliki perusahaan untuk tetap loyal terhadap perusahaan. Mengidentifikasi dan mempertahankan karyawan yang mempunyai talenta membuat beberapa Vice President SDM memikirkan kemungkinan dan peluang (Kaliprasad, 2006).

Tujuan dari retensi karyawan ialah untuk mempertahankan karyawan yang dianggap berkualitas, yang dimiliki oleh perusahaan, selama mungkin, karena karyawan yang berkualitas merupakan harta yang tidak tampak (*intangible asset*), yang tak ternilai bagi perusahaan. Retensi akan meningkat ketika karyawan ditawarkan sejumlah kompensasi dan keuntungan-keuntungan, kultur kerja yang mendukung, sekaligus adanya keseimbangan antara bekerja dan aktivitas hidup (Messmer, 2006).

Istilah retensi terkait dengan istilah perputaran (*turnover*) yang berarti proses ketika karyawan-karyawan meninggalkan organisasi dan harus digantikan (Mathis dan Jackson, 2009). Menurut Hasibuan (2000) pemeliharaan karyawan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, dan apabila pemeliharaan karyawan kurang diperhatikan, semangat kerja, sikap dan loyalitas karyawan akan menurun.

Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan sikap karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwasanya tujuan pemeliharaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan,
2. Meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan,
3. Meningkatkan loyalitas dan menurunkan *turnover* karyawan,
4. Memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan,
5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya,
6. Memperbaiki kondisi fisik, mental dan sikap karyawan,
7. Mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis,
8. Mengefektifkan pengadaan karyawan.

Millenials Workers

Selama enam puluh tahun terakhir, terdapat tiga generasi, yaitu, Generasi *Baby Boomers*, Generasi X, dan Generasi Y yang dikenal juga sebagai generasi *millenials*.

Tabel 2. Perbedaan Antar Generasi Dalam Angkatan Kerja

Generasi	Tahun Kelahiran
Baby Boomer	1946-1964
Generasi X	1965-1980
Generasi Y (Generasi <i>Millenials</i>)	Lahir Setelah 1980

Sumber: Kaifi, et.al, 2012

Generasi *millenials* tumbuh dalam era digital, mereka lebih familiar akan komunikasi, media dan teknologi digital. Ciri khas mereka yang lebih paham tentang IT inilah yang membuat mereka mempunyai keunggulan kompetitif dan membuat generasi *millenials* ini menjadi suatu aset ketika mereka bekerja dengan teknologi. Generasi *millennials* memasuki lingkungan kerja yang tradisional dengan muatan teknologi digital, jaringan media sosial, dan harapan-harapan yang lebih

tinggi menuju lingkungan kerja yang lebih fleksibel. Generasi ini tahu apa yang mereka inginkan, lingkup pekerjaan mereka, tingkat kenyamanan dan saluran komunikasi mereka (Rai, 2012).

Sebuah studi dilakukan oleh Deloitte Consulting pada tahun 2005, berusaha untuk memahami bagaimana karakteristik generasi *millennials* ini dalam suatu angkatan kerja. Generasi ini mempunyai kekhususan yaitu terhubung secara digital. Penelitian yang ekstensif telah dilakukan pada generasi ini untuk memahami apa yang menandai mereka, harapan mereka, dan cara mereka terhubung dengan tempat kerja mereka.

Tabel 3. Generasi *Millenials* di Tempat Kerja

Bekerja dengan baik, bersama rekan kerja ataupun dalam sebuah tim
Kolaboratif, banyak akal, pemikir yang inovatif
Menyukai tantangan
Selalu membuat perbedaan
Ingin menghasilkan sesuatu yang berharga
Keinginan menjadi pahlawan
Tidak sabar
Nyaman dengan kecepatan dan perubahan
Berkembang pada fleksibilitas serta ruang untuk dijelajahi
Bermitra baik dengan mentor
Berpedoman pada nilai dan mengharapkan rasa hormat

Sumber: Deloitte Consulting (2005) "Who Are the Millennials, aka Generation Y?"

Generasi *millennials* merupakan generasi yang fleksibel, kolaboratif, dinamis, dan menghargai keberlanjutan, serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Lingkungan tempat kerja dianggap sebagai tempat yang terlibat secara emosional dimana mereka bersosialisasi, belajar dan berkolaborasi. Ini adalah area mereka atau ruang kerja mereka yang bersifat pribadi.

Generasi *millennials* juga emosional dan *stylish* generasi *millennials* lebih suka tempat kerja yang tidak terbatas, penuh warna dan terbuka dengan ruang-ruang percakapan dan zona santai tempat mereka untuk berkolaborasi, berinovasi dan berkreasi. (Generation Y and Workplace Annual Report 2010).

Populasi dan Sampel

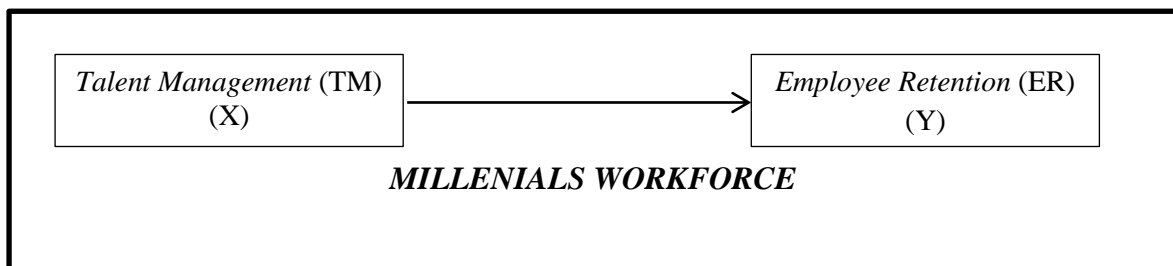
Populasi dalam penelitian ini adalah Angkatan Kerja *Millennials*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 karyawan, diambil secara *Random Sampling*.

Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu:

1. *Talent Management* (TM) (X)
2. *Employee Retention* (ER) (Y)

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha: *Talent Management* (TM) (X) berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Employee Retention* (ER) (Y) pada *Millennialss Workforce*

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data Primer, diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel *Talent Management* (TM), *Employee Retention* (ER); (2) Data sekunder, merupakan data mengenai objek penelitian yang diperoleh dari sumber lain, yaitu dari Literatur Buku dan berita *Online*.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara survei

menggunakan kuesioner yang disebarikan kepada responden. Peneliti juga melakukan wawancara dengan responden. Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 1 sampai 4. Masing-masing alternatif jawaban akan diberi nilai numerik sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju = 1; (2) tidak setuju = 2; (3) setuju = 3; dan (4) sangat setuju = 4.

Uji Instrumen

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner sebagai alat ukur dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur (Cooper dan Schindler, 2003). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengukur konsep yang diharapkan dan tidak mengukur hal yang lain (Sekaran, 2003). Uji validitas terdiri dari

tiga unsur, yaitu validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Untuk mengukur validitas isi kuesioner, dapat menggunakan validitas tampang (*face validity*). Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil-hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk (Hartono, 2004).

Penelitian ini menggunakan *Pearson's Correlation* untuk mengukur validitas konstruk dan validitas isi dari kuesioner. Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah tanpa bias dan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sekaran, 2003). Alat uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cronbach's Alpha* untuk mengetahui kehandalan atau konsistensi alat ukur untuk mengukur. Menurut Sekaran (2003), nilai koefisien reliabilitas mendekati 1.0 adalah semakin baik: (1) < 0.6 = buruk; (2) 0.7 = dapat diterima; dan (3) > 0.8 = baik.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode inferensial. Metode deskriptif dilakukan untuk menjelaskan variabel secara mandiri, dalam artian tidak menghubungkan maupun membandingkan dengan variabel lain. Sedangkan metode inferensial dipergunakan untuk menguji hipotesis, yang dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana, dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

- Y : *Employee Retention*
- a : Intersep
- b : Koefisien Regresi
- X : *Talent Management*
- E : Standar error

Uji validitas dan reliabilitas sebagai *initial procedure* dilakukan pada 30 (tiga

puluh) responden dan menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan adalah valid dan reliabel, dengan angka *Cronbach's Alpha* sebesar 0,81 sehingga dapat dikategorikan baik. Jumlah responden yang mengembalikan questioner adalah 60 orang, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang dan perempuan sebanyak 18 orang. Responden adalah pekerja yang lahir setelah tahun 1980, dari berbagai profesi seperti Pegawai Negeri Sipil, Dosen, karyawan di bidang perbankan, perkebunan, pariwisata, dan *Information Technology*, dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 19 orang dan S2 sebanyak 41 orang.

Ketika responden diberikan pertanyaan mengenai kebijakan tentang pengelolaan *talent management* di tempat responden bekerja, jawaban yang paling banyak muncul adalah "Ya", yaitu sebanyak 42 orang responden, sedangkan sisanya sebanyak 18 orang menjawab "Tidak". Meskipun sebanyak 18 orang menjawab "Tidak", pada dasarnya responden tersebut peduli akan adanya *talent management*, terbukti pada pertanyaan selanjutnya, mengenai kepedulian responden terhadap kebijakan perusahaan tentang *talent management*, sebanyak 48 orang responden menjawab "Ya" dan sebanyak 12 orang responden. Hal ini berarti responden memahami arti pentingnya suatu pengelolaan bakat, walaupun masih belum banyak dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Pada pertanyaan mengenai tingkat pengetahuan perusahaan tentang bakat/kemampuan responden, sebanyak 54 orang responden menjawab "Ya" sedangkan sisanya sebanyak 6 orang responden menjawab "Tidak". Hal ini berarti meskipun pengelolaan bakat karyawan belum terlalu mengemuka melalui program-program khusus, akan tetapi perusahaan telah mampu mengidentifikasi bakat masing-masing karyawan, kemungkinan dengan melakukan analisis jabatan sesuai dengan

kapabilitas dan bakat masing-masing karyawan.

Sedangkan hasil estimasi pada analisis regresi linier sederhana yang

dilakukan menggunakan *software* SPSS ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Dampak Talent Management Terhadap Employee Retention

Variabel Independen	Variabel Dependen	Konstanta	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.t	Keterangan
<i>Talent Management</i>	<i>Employee Retention</i>	2,270	0.309	3.210	0.002	H _a didukung

Sumber: Hasil Analisa Data dengan Menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel tersebut maka hasil regresi linier sederhana dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,270 + 0,309X$$

$$t\text{-statistik} = 7,530 \quad 3,210$$

$$R^2 = 0,151$$

Secara statistik, variabel *Talent Management* berpengaruh secara signifikan terhadap *Employee Retention* pada *Millenials Workforce*. Hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya nilai t-statistik yang diperoleh yaitu 3,210 lebih besar daripada t-tabel dengan degree of freedom (df) = 58, derajat kepercayaan 5% yaitu 2,000 dengan sifat uji dua sisi. Hipotesis alternatif *Talent Management* berpengaruh secara signifikan terhadap *Employee Retention* pada *Millenials Workforce* mampu dibuktikan.

Pembahasan

Mengidentifikasi dan mempertahankan karyawan kunci akan selalu menjadi tantangan dalam organisasi, hal ini akan menjadi lebih sulit jika dihadapkan pada karyawan yang juga mempunyai kemampuan yang lebih. Karyawan berpendapat bahwa praktek-praktek pengelolaan Sumber Daya Manusia mempunyai tujuan dan hubungan yang positif dengan *Employee Retention*

atau upaya-upaya untuk mempertahankan karyawan. Pada masa sekarang ini pengelolaan karyawan menjadi lebih dinamis dan kompleks, angkatan kerja *millenials* dengan segala karakteristiknya dengan cepat akan mengubah sudut pandang pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Talent management yang dilakukan selama ini memang merupakan suatu hal yang strategis yang harus dilakukan oleh perusahaan, akan tetapi perusahaan perlu untuk mengubah sudut pandang dari sisi pengelolaan karyawan. Jika pada masa-masa sebelumnya pengelolaan karyawan terbukti berhasil pada Generasi *Baby Boomers* dan Generasi X, namun pengelolaan tersebut akan menjadi pengelolaan yang bersifat konvensional jika yang dikelola adalah Generasi Y atau *Millenials*. Manajemen Bakat (*Talent Management*) yang tepat akan dapat meningkatkan produktivitas dan akan membuat program *Employee Retention* perusahaan menjadi program yang mampu

mengadaptasi tuntutan-tuntutan para *Millennials Worker*.

Millennials memasuki perusahaan tanpa melihat pengalaman dalam berkarir, mereka tidak tertarik untuk menaiki tangga karir perusahaan, menyenangkan pimpinan dan menghasilkan uang yang lebih. Mereka mempersiapkan pekerjaan lebih keras daripada generasi sebelumnya, akan tetapi mereka tidak akan menjadi produktif ketika ditempatkan dalam suatu kotak dan berharap supaya mereka akan menghasilkan kinerja selama delapan jam sehari. Dengan pendidikan yang baik, kemampuan yang tinggi dalam teknologi dan kepercayaan diri, generasi ini mengharapkan stimulasi, kolaborasi dan kompensasi. Pekerjaan perlu menjadi menarik untuk mereka dan secara sukses menarik mereka dalam pekerjaan dengan cara yang berbeda (Buchanon, 2010; Gilbert, 2011).

Employee Retention yang tepat dalam mempertahankan karyawan *millennials* yang bertalenta adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan para *millennials workforce*, fleksibilitas dalam bekerja perlu diciptakan sehingga akan menciptakan ruang yang luas bagi para *millennials* untuk meningkatkan kemampuan mereka. menciptakan suasana kerja yang kolaboratif serta memberikan otonomi kepada *millennials* akan membuat mereka lebih kreatif dan lebih menjadi inovatif.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *Talent Management* terhadap *Employee Retention* pada *Millennials Workforce*. Berdasarkan hasil pengujian statistik, nilai R^2 menunjukkan angka yang rendah, yaitu 0,151, yang berarti bahwa terdapat variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, yang berpengaruh terhadap *Employee Retention*. Pengelolaan karyawan *millennials* melalui *Employee Retention* mengubah sudut pandang perusahaan

bahwa pengelolaan yang secara konvensional telah dijalankan selama ini harus dikoreksi dan menyesuaikan dengan perkembangan angkatan kerja yang di masa yang akan datang yang akan didominasi oleh pemanfaatan Teknologi Informasi serta tuntutan fleksibilitas dalam menjalankan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchanon, L. 2010. *Meet the Millennials*. Inc 32(6) 166-180.
- Deloitte Consulting. 2005. *Who Are The Millennials (aka Generation Y)?* New York: Deloitte & Touche USA.
- Gilbert, J. 2011. *The Millennials: The New Generation Of Employee And New Set Of Engagement Policies*. The Workplace (September/October 2011).
- Kaliprasad, M. 2006. *The Human Factor I: Attracting, Retaining, And Motivating Capable People*. Cost Engineering, 48(6), 20-26.
- Lockwood, N. R., 2006. *Talent Management: Driver for Organizational Success'* (SHRM Research Quarterly 2006). (Electronic) Available at: http://findarticles.com/p/articles/mi_m3495/is_6_51/ai_n26909340/, 09.12.2011.
- Markos, S. dan Sridevi, M.S. 2010. *Employee Engagement: The Key to Improving Performance*. International Journal of Business and Management, 5, 89-96.
- Messmer, M. 2006. Four keys to improved staff retention. *Strategic Finance*, 88(4), 13-14.
- Oladapo, Victor. 2014. *The Impact of Talent Management on Retention*.

Journal of Business Studies
Quarterly Vol. 5 No. 3.

Rai, Soumi. 2012. Engaging young employees (Gen Y) in a social media dominated world – Review and Retrospection *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 37 (2012) 257 – 266.

Rampersad, Hubert K. 2006. *Personal Balance Scorecard : The Way to Individual Happiness, Personal Integrity and Organization Effectiveness*. United States: McGraw-Hill Education.

Salahuddin, M.M.. 2010. *Generational Differences Impact On Leadership Style And Organizational Success*. *Journal of Diversity Management* 5(2), 1-6.

Smilansky, J. 2005. *The Systematic Management of Executive Talent*. London: Hydrogen.

Sumarni, Murti. 2011. *Pengaruh Employee Retention Terhadap Turnover Intention dan Kinerja Karyawan*. *Akmenika* Vol. 8 bulan Oktober.

Towers Perrin. (2003). *Working today: Understanding what drives employee engagement*. Retrieved August 27, 2007, from <http://www.towersperring.com>.

<https://finance.detik.com>, diakses pada tanggal 4 April 2018.

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

Dewi Kusuma Wardani, Hany Nur Setiya Putri

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Jl. Kusumanegara No.121, Umbulharjo, Yogyakarta

dewi.kusuma@ustjogja.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of profitability, capital structure, fixed asset intensity, and economic growth towards tax management using effective tax rates as an indicator in Real Estate and Property companies in the period 2011-2014. We used the secondary data from IDX and BPS of Product Domestic Bruto. Multiple regression analysis is the method of analysis used. The sampling technique used in this research is purposive sampling method and obtained 96 samples of data for 24 companies. The regression test results showed that profitability has a significant positive effect to tax management, capital structure has a significant negative to tax management. While, for the fixed asset and economic growth does not effect on the tax management.

PENDAHULUAN

Pendapatan dari sektor pajak sampai saat ini menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar. Hal itu bisa dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2016 dengan pendapatan negara di Indonesia sebesar Rp. 1.822,5 triliun, pajak berkontribusi sebesar Rp. 1.360,2 triliun yaitu sebanding dengan 75% jika dibandingkan dengan penerimaan yang lainnya. Meskipun pendapatan dari sektor pajak setiap tahunnya meningkat, tetapi dalam skala persentase masih kurang dari perencanaan yang ditetapkan. Ketercapaian ini dikarenakan masyarakat masih enggan untuk membayar pajak.

Keengganan masyarakat dalam membayar pajak dikarenakan pajak merupakan beban yang harus dibayar wajib pajak. Wajib pajak badan khususnya, akan melakukan penekanan pajak serendah mungkin agar bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya penekanan pajak tersebut maka akan memicu perlakuan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak oleh wajib pajak. Penghindaran pajak maupun penggelapan pajak harus diatasi dengan

memperbaiki pengelolaan pajaknya yaitu dengan melakukan suatu manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan tindakan perusahaan dengan cara meminimalkan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang. Manajemen pajak di dalam penelitian ini diukur dengan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak dalam suatu perusahaan (Imelia, 2015:02). Semakin rendah tarif pajak efektif maka semakin tinggi manajemen pajak.

Survei dari sebuah lembaga keuangan, banyak orang yang telah berinvestasi jika telah membeli properti. Diantara beberapa alasan orang Indonesia untuk berinvestasi pada sektor properti adalah karena harganya yang cenderung naik (www.kompas.com, edisi 05 Oktober 2015, akses 08 Maret 2017). Industri properti merupakan industri yang sangat berpengaruh pada perekonomian di Indonesia terutama dalam hal pembayaran pajak. Kegiatan di bidang properti dapat dijadikan indikator aktifnya kegiatan ekonomi negara yang sedang berlangsung (Wuryandani, dkk, 2005:04). Kenaikan harga pada sektor properti maka akan

diikuti dengan naiknya biaya produksi serta naiknya harga jual (Natalia,2014:04). Dengan naiknya harga pada produk properti tersebut akan mempengaruhi jumlah penerimaan atau keuntungan perusahaan. Perusahaan properti akan berupaya untuk menyeimbangkan antara biaya yang harus dikeluarkan dengan pendapatan yang akan diperoleh yaitu dengan manajemen pembayaran pajaknya.

Fenomena manajemen pajak pada perusahaan *Real Estate* dan *Property* tidak bisa dipungkiri lagi. *Developer* properti membantah pelaporan pajak properti menggunakan dasar harga transaksi sebenarnya dan bukan Nilai Jual Obyek Pajak. Bukti konkret penggunaan NJOP untuk perhitungan pajak transaksi muncul dari *developer* di Depok dan Semarang. Fakta mengejutkan muncul dari sidang simulator SIM (18/06/2013), terdapat penjualan rumah mewah oleh *developer* kepada terdakwa seharga Rp.7,1 milyar di Semarang namun di akta notaris hanya tertulis 940 juta atau terdapat selisih harga Rp. 6,1 milyar. Atas transaksi ini ada potensi PPN yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp.610 juta. Kekurangan lain PPh final sebesar 5% dikalikan Rp. 6,1 milyar atau Rp.300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp.900 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Penggunaan nilai NJOP untuk transaksi *developer* bukan karena ketidaktahuan aturan pajak. Namun, berupa tindakan menyembunyikan omset dengan melakukan penghindaran pajak (www.pajak.go.id edisi 25 Juni 2013, diakses 30 Oktober 2017).

Kasus manajemen pajak di Indonesia salah satunya terjadi pada PT Rajawali Nusantara (PT RNI). Modus yang dilakukan PT RNI adalah menggantungkan hidup dari utang afiliasi, artinya pemilik di Singapura memberi pinjaman kepada PT RNI di Indonesia.

Pemilik tidak menanamkan modal, tetapi seolah-olah seperti memberikan pinjaman. Ketika utang diangsur, bunga dianggap dividen oleh pemilik di Singapura. Hal ini dilakukan agar pemilik terhindar dari Pajak Penghasilan karena memiliki usaha di Indonesia. Modus lain yang dilakukan PT RNI adalah memanfaatkan PP 46/2013 tentang PPh Final 1%. Meskipun secara aturan benar karena omset PT RNI dibawah Rp 4,8 milyar pertahun yakni sebesar Rp 2,178 miliar, namun PMA seharusnya tidak secara etis meminta fasilitas perpajakan UMKM (www.kompas.com edisi 06 April 2016, diakses 09 Desember 2016). Selain di Indonesia, kasus yang sama juga terjadi pada perusahaan Google. Semenjak September lalu, Google telah dibidik oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terkait potensi tunggakan pajak yang selama ini dihindari Google.

Terjadinya manajemen pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal yang pertama adalah profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin besar kesempatan perusahaan untuk melakukan manajemen pajaknya. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah (Darmawan dan Sukartha,2014:148).

Faktor internal kedua yang mempengaruhi manajemen pajak adalah hutang. Apabila perusahaan mempunyai hutang yang tinggi maka perusahaan cenderung meningkatkan laba (Watt dan Zimmerman (1986, dikutip dari Dharma dan Ardiana,2016:605). Dengan naiknya laba maka beban pajak perusahaan juga semakin meningkat. Jika beban pajak perusahaan meningkat mengindikasikan perlakuan manajemen pajaknya rendah.

Faktor internal ketiga yang mempengaruhi manajemen pajak adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap

(Darmadi, Zulaikha,2013:05). Semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya depresiasi modal, perusahaan akan mempunyai ETR yang rendah (Putri dan Lautania,2016:105). Tarif pajak efektif yang rendah mengindikasikan manajemen pajaknya tinggi.

Faktor eksternal yang akan diteliti menggunakan pertumbuhan ekonomi. Madura dalam Nufus (2014:40) mengilustrasikan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka pendapatan individu akan tinggi, hal tersebut berimbas pada naiknya pengeluaran untuk produk barang dan jasa, otomatis permintaan akan produk barang dan jasa akan mengalami kenaikan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan dalam sisi peningkatan laba dan meningkatkan pajak penghasilan sehingga manajemen cenderung untuk melakukan manajemen pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan penambahan variabel pertumbuhan ekonomi yang belum pernah diteliti pengaruhnya terhadap manajemen pajak. Peneliti tertarik untuk menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi karena kondisi perekonomian akan berpengaruh pada manajemen pajak yang dilakukan perusahaan *Real Estate* dan *Property*. Mengingat kebijakan ekonomi Donald Trump yang membahas mengenai penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika. Selama delapan tahun pemerintahan Barack Obama, perekonomian Amerika mengalami kemunduran signifikan. Sosok Trump sebagai pengusaha sukses dinilai tepat untuk menyuburkan kembali ekonomi AS. Dalam reli kampanye 28 Oktober lalu di negara bagian New Hampshire, Trump menyindir lemahnya perekonomian AS di bawah pemerintahan Obama. Mengutip dari *PolitiFact*, Obama merupakan satu-satunya Presiden AS dalam sejarah modern yang pertumbuhan ekonominya

tidak sampai 3% dalam setahun. Trump ingin mengembalikan kejayaan Amerika sebagai negara besar yaitu salah satunya dengan pajak. Seperti pemotongan pajak perusahaan, saat ini pajak perusahaan Amerika Serikat mencapai 35%, hal yang membuat Apple mengalihkan usahanya ke Irlandia karena menghindari pajak tinggi. Trump telah berjanji melakukan pemotongan pajak korporasi dari 35% menjadi 15%. Trump juga menghilangkan pajak *real estate* dan mengurangi pajak individu. (<https://ekbis.sindonews.com> terbitan 09 November 2016, diakses 17 November 2017). Dengan hilangnya pajak yang dibayarkan perusahaan *real estate* tersebut, maka akan berpengaruh pada tindakan manajemen pajaknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena banyaknya kasus penghindaran pajak di Indonesia khususnya sektor *real estate* dan *property* serta masih ditemukannya hasil penelitian yang berbeda antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Manajemen Pajak.”

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Profitabilitas menurut Sudarmadji dan Sularto (2007:54) merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sufiyanti dan Wardani:334). Tingginya nilai profitabilitas akan membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal. Perusahaan yang beroperasi

dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah (Ridlwani,2016:11).

Profitabilitas perusahaan dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya untuk menurunkan tarif pajak efektifnya (Amelia,2015:47). Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka manajemen pajak yang dilakukan akan semakin maksimal untuk mendapatkan tarif pajak efektif yang rendah dan menghindari kerugian yang ditimbulkan.

Penelitian yang dilakukan Ridlwani (2016:10), dan Amelia (2015:96) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan Darmadi dan Zulaikha (2013:09), Imelia (2015:13) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Manajemen Pajak

Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluarannya (Darmadi,2013:40). Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi, tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka karena terikat dengan kepentingan kreditur (Gemilang,2017:35). Apabila perusahaan mempunyai hutang yang tinggi maka perusahaan cenderung meningkatkan laba, Watt dan Zimmerman (1986, dikutip dari Dharma dan Ardiana,2016:605). Perusahaan akan menunjukkan laba yang baik agar perusahaan tidak dipandang kurang sehat oleh kreditur karena masih terikat dengan kontrak hutang (Dharma dan Ardiana,2016:605). Semakin tinggi hutang perusahaan, maka semakin tinggi upaya yang dilakukan perusahaan untuk

menaikkan labanya. Dengan naiknya laba maka beban pajak perusahaan juga semakin meningkat. Jika beban pajak perusahaan meningkat mengindikasikan perlakuan manajemen pajaknya rendah.

Penelitian yang dilakukan Singly dan Sukharta (2015:58), Dharma dan Ardiana (2016:604) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat hutang maka akan semakin berkurang tindakan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015:12) menemukan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ardyansah dan Zulaikha (2014:07), Darmadi dan Zulaikha (2013:10) menemukan bahwa hutang perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

H2: Tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak

Definisi aset tetap berdasarkan SAK ETAP (2009, par 15.2) sebagai “aset berwujud yang (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.” Intensitas aset tetap dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap (Darmadi, Zulaikha,2013:05). Semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya depresiasi modal, perusahaan akan mempunyai ETR yang rendah (Putri dan Lautania,2016:105). Perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit (Gemilang,2017:37).

Penelitian yang dilakukan Putri dan Lautania (2016:111) menemukan bahwa semakin besarnya intensitas aset tetap maka tarif pajak efektif perusahaan

semakin rendah. Tarif pajak efektif yang rendah mengindikasikan manajemen pajaknya tinggi. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Darmadi dan Zulaikha (2013:09) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan Ardyansah dan Zulaikha (2014:07), dan Imelia (2015:13) menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H3: Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Manajemen Pajak

Simon Kuznetz mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi instutusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan perusahaan dapat beroperasi dengan baik sehingga meningkatkan labanya. Madura dalam Nufus (2014:40) mengilustrasikan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka pendapatan individu akan tinggi, hal tersebut berimbas pada naiknya pengeluaran untuk produk barang dan jasa, otomatis permintaan akan produk barang dan jasa akan mengalami kenaikan. Dengan naiknya permintaan produk barang dan jasa maka akan berdampak pada naiknya laba perusahaan. Naiknya laba perusahaan mengindikasikan profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Untuk memperoleh laba yang maksimal maka

manajemen akan berusaha untuk meminimalkan pajak dengan melakukan manajemen pajak.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal (Darmawan dan Sukartha,2014:145). Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah (Ridlwani,2016:11). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan dalam sisi peningkatan laba dan meningkatkan pajak penghasilan sehingga manajemen cenderung untuk melakukan manajemen pajak supaya pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Penelitian yang dilakukan Rinaldi dan Cheisviyanny (2015:477), dan Ridlwani (2016:10) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh pada manajemen pajak perusahaan. Tingginya laba perusahaan akan berpengaruh pada meningkatnya pajak yang dibayarkan perusahaan yang berdampak pada semakin meningkatnya manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Hendrayanti dan Muharam (2013:12) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk memprediksi laba perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diperoleh yaitu:

H4: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Operasional dan Pengukurannya

Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen pajak yang diukur dengan tarif pajak efektif. Manajemen pajak menurut Darmadi (2013:11) yaitu

pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan tindakan perusahaan dengan cara meminimalkan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang. Semakin tinggi tarif pajak efektif, maka semakin rendah manajemen pajak, dan sebaliknya.

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Profitabilitas

Definisi dari profitabilitas menurut Sudarmadji dan Sularto (2007:54) merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan.

Perusahaan yang mempunyai laba yang besar sangat dimungkinkan memiliki tarif pajak yang tinggi, sehingga mempunyai kesempatan yang lebih tinggi untuk melakukan manajemen pajak.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Tingkat Hutang

Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluarannya (Darmadi,2013:40). Pemilihan hutang sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Masri dan Martani, 2012:04).

$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas Aset Tetap

Definisi aset tetap berdasarkan SAK ETAP (2009, par 15.2) sebagai “aset berwujud yang (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.” Perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar akan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang memiliki rasio lebih kecil karena adanya depresiasi pada aset tetap.

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pertumbuhan ekonomi yaitu ukuran kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2014.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDB}_t - \text{PDB}_{t-1}}{\text{PDB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDB_t = Produk Domestik Bruto tahun yang dihitung

PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *Real Estate* dan *Property* yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai 2014. Perusahaan yang menjadi

sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Sampel yang diperoleh sebanyak 96 sampel yang terdiri dari 24 perusahaan. Sampel yang diambil adalah perusahaan yang termasuk dalam kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan *Real Estate* dan *Property* yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai 2014.
2. Perusahaan yang mempublikasikan *annual report* dan data keuangan yang lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2011 sampai 2014.
3. Perusahaan yang tidak memiliki kerugian pada tahun yang bersangkutan.
4. Perusahaan yang memiliki ETR 0-1.
5. Perusahaan yang menggunakan satuan rupiah dalam laporan keuangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Profitabilitas, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Manajemen Pajak. Hasil dari uji asumsi klasik telah memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi linier berganda.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi variabel pengganggu atau residual. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai *2-tailed significant* dengan pengukuran tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil uji normalitas diketahui bahwa besarnya nilai

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data faktor internal diambil dari Laporan Keuangan Tahunan yang didapatkan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan untuk data Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari Data Produk Domestik Bruto dengan tahun dasar 2000 dari Badan Pusat Statistik.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Peneliti melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Dalam analisis regresi linier berganda terdapat tiga uji untuk menguji hipotesis, yaitu (1) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F), (2) Uji Signifikan Parameter Individu (Uji Statistik Q), (3) Uji koefisien Determinasi (R^2).

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,527 dan signifikansi pada 0,944 hal ini menunjukkan data residual terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

bebas (independen) (Ghozali, 2011:105). Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan data yang sudah di Ln (logaritma natural). Nilai *tolerance* untuk variabel Profitabilitas sebesar 0,966, variabel Tingkat Hutang sebesar 0,968, variabel Intensitas Aset Tetap sebesar 0,984, dan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,981 untuk interaksi antar variabel tersebut. Nilai VIF untuk variabel Profitabilitas sebesar 1,035, variabel Tingkat Hutang sebesar 1,033, variabel

Intensitas Aset Tetap sebesar 1,016, dan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,019. Nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011:19). Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan *uji glejser*. Hasil dari uji ini diperoleh nilai Sig. pada variabel LN_X1 0,323, LN_X2 0,054, LN_X3 0,981, LN_X4 0,200 > 0,05, sehingga dapat

disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2011:110). Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan *run test*. Nilai test adalah 0,00825 dengan probabilitas signifikansi 0,151 lebih dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai tersebut.

**Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Model (Uji F)**

**Tabel 1
Hasil Uji Model**

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	11.317	4	2.829	26.421	.000 ^a
<i>Residual</i>	9.744	91	.107		
<i>Total</i>	21.061	95			

a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X3, LN_X2, LN_X1

b. Dependent Variable:
LN_Y

Nilai F hitung sebesar 26,421 > F tabel 2,47 dan sigifikan pada 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu dari variabel independen yaitu Profitabilitas (LN_X1), Tingkat Hutang (LN_X2), Intensitas Aset Tetap (LN_X3), dan Pertumbuhan Ekonomi (LN_X4) secara berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu Manajemen Pajak (LN_Y). Hal ini menunjukkan bahwa model yang diajukan *fit*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

**Tabel 2
Hasil Uji R Square**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.733 ^a	.537	.517	.32723

a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X3, LN_X2, LN_X1

Nilai *adjudted R Square* sebesar 0,517 yang berarti pengaruh Profitabilitas, Tingkat Hutang, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Ekonomi 51,7%. Sisanya 48,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Tabel 3
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-2.811	1.033			-2.722	.008
LN_X1	-.520	.053	-.707		-9.751	.000
LN_X2	.371	.087	.310		4.279	.000
LN_X3	.018	.023	.056		.773	.442
LN_X4	-.018	.352	-.004		-.051	.959

a. Dependent Variable: LN_Y

Dari hasil uji T diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$LN_Y = -2,811 - 0,520 LN_X_1 + 0,371 LN_X_2 + 0,18 LN_X_3 - 0,18 LN_X_4 + \epsilon$$

Apabila seluruh variabel independen memiliki nilai nol, maka variabel dependen memiliki nilai sebesar -0,2811.

Pembahasan

Hipotesis 1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Nilai t hitung untuk profitabilitas adalah -9.751 dan nilai t tabel sebesar 1,66177. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap tarif pajak efektif atau profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen pajak. Dengan demikian H_0 ditolak, dan menerima H_1 . Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan arah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Tarif pajak efektif yang semakin rendah menunjukkan manajemen pajaknya semakin tinggi. Semakin tinggi profitabilitas semakin tinggi manajemen pajak perusahaan.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ridlwan (2016:10). Tingginya nilai profitabilitas akan membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal. Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang

beroperasi dengan efisiensi rendah (Ridlwan,2016:11). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Amelia (2015:96) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari seharusnya (Amelia,2015:96). Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015:13) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hipotesis 2: Tingkat Hutang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak

Nilai t hitung untuk tingkat hutang adalah 4,279 dan nilai t tabel sebesar 1,66177. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hutang berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif atau tingkat hutang berpengaruh signifikan negatif terhadap

manajemen pajak. Dengan demikian H_0 ditolak, dan menerima H_2 . Hasil uji t diperoleh bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, sehingga semakin tinggi tingkat hutang maka semakin tinggi tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif yang semakin tinggi menunjukkan manajemen pajaknya semakin rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Swingly dan Sukartha (2015:58) yang menemukan bahwa tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Perusahaan menggunakan hutang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha (Gemilang,2017:69). Dengan bertambahnya pendapatan di luar usaha tersebut maka akan meningkatkan laba perusahaan yang berdampak pada naiknya tarif pajak efektif perusahaan. Naiknya tarif pajak efektif mengindikasikan manajemen pajak perusahaan tidak dilakukan secara maksimal.

Teori akuntansi positif dalam hipotesis perjanjian hutang menjelaskan semakin tinggi hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan yang dijelaskan melalui laba karena semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal (Gemilang,2017:34). Perusahaan yang memiliki rasio *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan laba (Prasetyo,2011:39). Meningkatnya laba akan berdampak pada meningkatnya beban pajak perusahaan. Beban pajak perusahaan yang tinggi mengindikasikan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan rendah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015:12) yang menemukan bahwa

tingkat hutang berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Darmadi dan Zulaikha (2013:10), Ardyansah dan Zulaikha (2014:06) juga menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hipotesis 3: Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Nilai t hitung untuk intensitas aset tetap adalah 0,773 dan nilai t tabel sebesar 1,66177. Nilai signifikansi $0,442 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif atau intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dengan demikian H_0 diterima, dan menolak H_3 . Hal ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh pada manajemen pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Imelia (2015:13), penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014:07). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Amelia (2015:97). Perusahaan membuat kebijakan terhadap penyusutan aset tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan tidak perlu melakukan koreksi fiskal terhadap aset tetap dalam perlakuan perhitungan pajak terhutang untuk tahun pajak tersebut, sehingga intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*, (Haryadi (2012,dikutip dari Amelia, 2015:98). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Putri dan Lautania (2016:111), Darmadi dan Zulaikha (2014:10), Dharma dan Ardiana (2016:606) yang menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Aset tetap dalam perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda dan memiliki beban depresiasi yang berbeda, penyimpanan aset tetap yang besar yang dilakukan perusahaan bukan semata-mata untuk menghindari pajak melainkan hal tersebut dilakukan oleh perusahaan

dengan tujuan untuk menjalankan operasional perusahaan (Dharma dan Ardiana, 2016:606).

Hipotesis 4: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak

Nilai t hitung untuk pertumbuhan ekonomi adalah -0.051 dan nilai t tabel sebesar 1,66177. Nilai signifikansi $0,959 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif atau pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dengan demikian H_0 diterima, dan menolak H_4 . Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada manajemen pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan *real estate* dan *property*. Data menunjukkan pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi 6,3%, dan menurun pada tahun 2013 menjadi 5,7%, namun penerimaan pajak khususnya pajak properti pada tahun 2013 diproyeksikan meningkat sebesar 32% dibanding tahun 2012 menjadi Rp.12 triliun (<http://www.beritasatu.com> diakses 26 November 2017). Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, hal tersebut mengindikasikan tidak akan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan *real estate* dan *property*. Manajemen pajak dari sektor properti dipengaruhi oleh faktor lain seperti keadaan internal perusahaan yaitu jumlah labanya, kesempatan memperoleh fasilitas perpajakan, dan bukan karena faktor keadaan ekonomi negara.

Hasil penelitian Hendrayanti dan Muharam (2013:12) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk memprediksi laba

perusahaan. Dengan tidak terprediksinya profitabilitas tersebut membuat perusahaan tidak memanfaatkan celah-celah perpajakan untuk melakukan manajemen pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rinaldi dan Cheisviyanny (2015:477), dan Ridlwan (2016:10) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh pada manajemen pajak perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan tingkat hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Di sisi lain, intensitas aset tetap dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran bagi Direktorat Jenderal pajak, investor dan calon investor, serta bagi peneliti selanjutnya.

1. Direktorat Jenderal Pajak
 - a. Direktorat Jenderal Pajak harus lebih meningkatkan pengawasan pada perusahaan *real estate* dan *property* yang mempunyai profitabilitas yang tinggi karena perusahaan yang mempunyai laba yang tinggi akan semakin meningkatkan perlakuan manajemen pajak pada perusahaannya.
 - b. Direktorat Jenderal Pajak dapat mengurangi tindakan pengawasannya pada perusahaan *real estate* dan *property* yang mempunyai tingkat hutang yang tinggi karena perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang tinggi akan semakin berkurang tindakan manajemen pajaknya untuk menjaga stabilitas perusahaan dimata kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

2. Investor dan Calon Investor
 - a. Mempertimbangkan profitabilitas dan tingkat hutang perusahaan jika akan berinvestasi di sektor *property* dan *real estate* untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan.
 - b. Besarnya aset tetap dan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi adanya manajemen pajak perusahaan, sehingga investor atau calon investor dapat mempertimbangkan faktor lain selain intensitas aset tetap dan pertumbuhan ekonomi jika akan melakukan investasi pada perusahaan *Real Estate* dan *Property*.
 3. Bagi Penelitian Selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang berbeda, menambah sampel dan menggunakan industri sektor lain sehingga dapat menggeneralisasikan penelitian.
 - b. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian. Menggunakan faktor-faktor internal seperti *Good Corporate Governance*, Pertumbuhan Penjualan, serta menggunakan faktor eksternal seperti inflasi apakah ada pengaruhnya terhadap manajemen pajak.
 - c. Menggunakan salah satu variabel bebas dalam penelitian untuk dijadikan variabel moderasi atau *intervening* dan menghubungkan pengaruhnya terhadap manajemen pajak.
 - d. Menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi untuk diuji kembali pengaruhnya terhadap manajemen pajak untuk mendapatkan hasil penelitian yang berbeda.
- Amelia, Vicky.2015. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014).” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Ardyansah, Danis.2013. “Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Capital Intensity Ratio*, dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rates (ETR)*”.*Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Ardyansah, Danis., dan Zulaikha.2014. “Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Capital Intensity Ratio*, dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rates (ETR)*”.*Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Bachtiar, Mohammad Danu. 2015.“Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan *Capital Intensity* Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*, (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013.” *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim.2013.”Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di

- Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012". *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim., dan Zulaikha.2013."Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012". *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukharta. 2014. "Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Asset*, Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak". *Ejurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Dharma, I Made Surya., dan Ardiana, Putu Agus.,2016. "Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*." *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Gemilang, Desi Nawang.2017. "Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan *Real Estate* dan *Property* yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hendrayanti,Silvia.,dan Muharam, Harjum.2013. "Analisi Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Januari 2003-Februari 2012)." *Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Imelia, Septi. 2015. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012".*Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru*.
- Informasi APBN 2016.Kementrian Keuangan. Diakses pada tanggal 01 Desember 2016.
- Masri, Indah dan Martani, Dwi. 2012. "Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt*." *Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin*.
- Natalia, Belgin.2014. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Umur Perusahaan Dan Inflasi Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Subsektor *Property* Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonsia Periode 2010-2012." *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Nufus, Hayatun.2014. "Analisis Pengaruh Struktur Pasar dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan pada Bank Komersial ASEAN 2005-2012." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*
- Prasetyo,Wika Septian.2011. "Pengaruh *Corporate Governance, Bonus Plans, Debt-Covenant*, dan *Firm*

- Size* terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.” *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Putri, Citra Lestari., dan Lautania, Maya Febrianty.2016.”Pengaruh *Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (Etr)* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2014)”. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*.
- Raharjo, Eko.2007. “Teori Agensi Dan Teori Stewarship Dalam Perspektif Akuntansi”. *Jurnal Ekonomi* Vol. 02 No.1, Juni:37-46.
- Ridlwan, Achmad Zein.2016. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Rinaldi., dan Cheisviyanny, Charoline.2015. “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013)”. *Jurnal Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang*.
- Sudarmadji, Ardi M., dan Sularto, Lana.2007. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas *Voluntary Disclosure* Laporan Keuangan Tahunan”. *Proceeding PESAT*, Vol 2.
- Sufiyanti, Fenni. dan Wardani, Dewi Kusuma. “Dampak Rasio Keuangan terhadap Peringkat Obligasi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” *Proceeding Seminar Nasional dan 3rd Call for Syariah Paper*
- Sugiharto, Bintoro A, “Google Beri Sinyal Bayar Tunggakan Pajak ke Pemerintah,” www.cnnindonesia.com edisi 24 November 2016. Diakses pada tanggal 08 Maret 2017.
- Suryana, Anandita Budi., “Tax Evasion Pajak Properti.” www.pajak.go.id edisi 25 Juni 2013, diakses 30 Oktober 2017
- Suryowati, Estu “Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura,” www.kompas.com edisi 06 April 2016. Diakses pada tanggal 09 Desember 2016.
- Swingly, Calvin., dan Sukartha, I Made.2015. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* Pada *Tax Avoidance*.” *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Syukro, Ridho. “Penerimaan Property Meningkatkan 32%.” <http://www.beritasatu.com> edisi 21 November 2013. Diakses 26 November 2017.

Undang-Undang No 16 Tahun 2009
tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan

Wijayanti, Amalia.2015. “Analisis
Penerimaan Pajak Indonesia:
Pendekatan Ekonomi Makro.”
*Skripsi Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Diponegoro.*

Wuryandani, Gantiah., Hermant, Matinus
Jony., dan Prasetya, Reska.2005.
“Perilaku Pembiayaan Dalam
Industri Properti”. *Jurnal bank
Indonesia, <http://www.bi.go.id/>*

DETERMINAN RISK TAKING BANK PERKREDITAN RAKYAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Risal Rinofah, Ayu Laksita Widaresti, Noviani Desy Purbasari
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Jl. Kusumanegara No.121,
Umbulharjo, Yogyakarta
risalrinofah@ustjogja.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to test the efficiency, diversification and ownership concentration on risk level of BPR banks in DIY. BPR is chosen because it has a closed relationship with SMEs due to its main functions on the micro economy growth through credit channeling.

Research data on 26 BPR during 2012-2016 were tested using multiple regression analysis technique. The test concludes only the efficiency proven to affect the risk of BPR banks. While the level of income diversification and ownership concentration has no effect.

Keywords: efficiency, diversification and concentration of ownership to the level risk

PENDAHULUAN

Perbankan yang termasuk dalam kelompok Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki perbedaan dibanding bank lainnya karena jenis perbankan ini identik dengan usaha kecil menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian negara. BPR juga telah didorong oleh pemerintah agar dapat menjadi katalisator pemerataan ekonomi di daerah melalui berkembangnya sektor ekonomi mikro. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pertumbuhan BPR khususnya BPR Konvensional selama 20 tahun ini berkembang sangat pesat. Dari data OJK, pada tahun 20 tahun lalu jumlah BPR Konvensional hanya berkisar belasan. Namun pada akhir tahun 2017 jumlah telah menjadi 54 bank. Ini menjadikan persaingan diantara BPR itu sendiri akan menjadi semakin ketat sehingga bank semakin

dituntut berkinerja baik termasuk dalam mengelola risikonya.

Namun dengan semakin ketatnya persaingan dan kompleksnya aktivitas perbankan risiko yang mungkin ditanggung juga semakin tinggi. BPR kini tidak hanya bersaing dengan sesama BPR namun juga dengan kredit mikro bank umum, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi Simpan Pinjam dan sebagainya. Untuk itulah kemudian Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan harapan dapat menciptakan sektor perbankan mikro yang kuat secara kelembagaan, memiliki reputasi baik agar dapat bertahan dalam ketatnya persaingan.

Aktivitas bisnis BPR yang sesungguhnya hampir sama dengan

bank umum menunjukkan jenis risikonya pun sama, misalnya risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan sebagainya. Risiko kredit dapat dilihat pada profil pengembalian dana kredit yang disalurkan kepada nasabah. Risiko operasional berkenaan dengan proses internal bank yang dapat disebabkan oleh ketidakcukupan kualitas SDM nya. Sementara rasio likuiditas terkait dengan kemampuan bank memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Dari ketiga risiko tersebut, risiko kredit merupakan risiko yang selalu menjadi perhatian penting karena sumber pendapatan terbesar bank termasuk BPR berasal dari bunga kredit yang disalurkan. Jika sumber pendapatan ini bermasalah maka rentetan masalah berikutnya berpotensi mematikan BPR itu sendiri.

Oleh karena itu BPR harus kreatif melakukan diversifikasi ragam jasa untuk memperoleh sumber pemasukan lain. Pendapatan-pendapatan di luar bunga ini sering disebut dengan istilah *fee based income*. Sumber pendapatan lain ini merupakan upaya diversifikasi pendapatan agar bank tidak tergantung pada pendapatan dari bunga dan besar kecilnya *fee based income* ini dapat menunjukkan profil risiko suatu bank. Selain melalui diversifikasi, risiko bank juga dapat ditekan dengan efisiensi operasional yang terlihat pada BOPO yang merupakan perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan tidak digunakan dengan efisien dan akan mempengaruhi risiko kredit bank. Hal berikutnya yang dapat mempengaruhi profil risiko bank adalah konsentrasi

kepemilikan dimana pemilik mengendalikan bank melalui perantara para komisaris yang menjadi wakil mereka. Pemilik pula yang memilih dan mengangkat para manajer profesional untuk mengelola perusahaan. Penelitian-penelitian oleh Paligorova (2009), Tacneng (2009), Nugraha (2011), Atiqoh (2015), Barus dan Erick (2016) menemukan kesimpulan bahwa *Fee Based Income*, BOPO dan Konsentrasi Kepemilikan memiliki pengaruh terhadap profil risiko bank yang diukur dengan NPL.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas maka permasalahan yang ingin dijawab oleh penelitian adalah: apakah *fee based income*, BOPO dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat risiko (*risk-taking*) bank BPR di DIY.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh, *fee based income* BOPO dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat risiko (*risk-taking*) bank BPR di DIY

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi penelitian-penelitian terdahulu sekaligus menjadi tambahan referensi baru untuk penelitian dengan topik yang serupa. Selain itu Penelitian ini diharapkan juga dapat memberi masukan baik bagi bank maupun otoritas regulator perbankan dalam menentukan keputusan pembuatan kebijakan untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip kehati-hatian operasional dan perlindungan terhadap nasabah dan pemilik modal.

KAJIAN PUSTAKA

Fee Based Income

Fee Based Income menurut Lapoliwa (2000) adalah pendapatan yang berasal dari pemberian jasa-jasa perbankan dalam bentuk komisi. Sedangkan menurut Kasmir (2004) *fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau *spread based* (selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Produk jasa perbankan yang menghasilkan *fee based income* antara lain berasal dari berbagai kegiatan transfer yakni memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer (*beneficiary*)” (Lapoliwa, 2000). Selain melalui kegiatan transfer, bank juga dapat memperoleh *fee based income* ini melalui:

- a. Inkaso (*Collection*), yaitu merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar negeri.
- b. Safe Defosit Box, yaitu jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya.
- c. Kliring (*Clearing*) adalah merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring.
- d. *Letter of credit* (L/C) adalah suatu fasilitas atau jasa yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional.

- e. *Credit card* adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu ini memberikan fasilitas penggunaan uang sampai dengan pagu/batas tertentu yang didasarkan pada pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh bank.
- f. Dana Pembayaran Rekening Titipan (*payment point*) adalah pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pajak tertentu, biasanya giro milik perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank.
- g. Garansi Bank adalah semua bentuk garansi yang tau jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin wanprestasi atau cidera janji.
- h. Jual Beli atau Perdagangan Valuta Asing
Sinungan (1994) menyatakan bahwa pendapatan yang berasal dari *fee-based* merupakan sumber pendapatan yang penting dalam bisnis perbankan dewasa ini. Jika pendapatan dari operasional utama (bunga) tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional bank, maka pendapatan-pendapatan di luar usaha inti ini dapat digunakan untuk menutupinya.

Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Riyadi (2006) menyatakan BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada

di perusahaan. Belanja operasional adalah biaya bunga yang diberikan pada nasabah sedangkan pendapatan operasional adalah bunga yang didapatkan dari nasabah. Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi. Menurut Berger, et al (Kuncoro dan Suhardjono, 2002), bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat. Dengan efisiensi biaya yang baik, semakin kecil rasio BOPO maka kondisi bermasalah juga semakin kecil atau sebaliknya.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan menunjukkan bagaimana distribusi kekuasaan dan pengaruh pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Dalam sebuah badan usaha sebaran kepemilikan dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu (a) **kepemilikan menyebar** (*dispersed ownership*) dan **kepemilikan terkonsentrasi** (*closely held/concentrated*). Kepemilikan saham terkonsentrasi adalah keadaan dimana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang

relatif dominan. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti institusional investors akan dapat memonitor tim manajemen secara lebih. Sedangkan kepemilikan menyebar adalah jika kepemilikan saham secara relatif merata ke publik tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar.

Pada struktur kepemilikan menyebar, konflik biasanya terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Hal ini dikarenakan kepemilikan investor relatif kecil sehingga tidak efektif untuk memantau kinerja manajemen. Sebagai konsekuensinya tanggung jawab manajer relatif besar sehingga menuntut gaji besar. Untuk menekan konflik tersebut diperlukan *agency cost* berupa gaji, berbagai fasilitas atau dilibatkan dalam kepemilikan manajerial. Konsentrasi kepemilikan menyebar dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan pengawasan. Adanya pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajer maka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Non-Performing Loan (NPL)

Rasio Non-Performing Loan merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah juga mencerminkan risiko kredit pada bank tersebut. Rasio Non-Performing Loan (NPL) atau tingkat kolektibilitas yang dicapai mencerminkan keefektifan dan

keefisienan dari penerapan strategi pemberian kredit.

Menurut ketentuan Bank Indonesia terdapat tiga kelompok kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) adalah sebagai berikut (Kuncoro dan Suhardjono, 2002):

1. Kredit kurang lancar (*substandard*) dengan kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90hari.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- b. Dokumentasi pinjaman yang lemah
2. Kredit Diragukan (*doubtful*) dengan kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - c. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - d. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - e. Terjadi kapitalisasi bunga.
3. Kredit Macet (*loss*) dengan kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPL sekecil mungkin. Dengan kata lain, tingginya NPL sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) dan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun gagal bayar (Djohanputro dan Kountur, 2007).

Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

Bank pada umumnya memperoleh pendapatan terbesarnya dari pendapatan bunga. Pada kenyataannya bank juga dapat memperoleh pemasukan selain bunga. Contoh pemasukan tersebut antara lain adalah pendapatan dari hasil transaksi valuta asing, provisi, fee dan pendapatan operasional lainnya yang sering disebut dengan istilah *fee based income*. Diversifikasi pendapatan ini merupakan upaya agar bank tidak tergantung pada pendapatan bunga kredit yang diberikan. Penelitian itu menggunakan *fee based* sebagai proksi diversifikasi dan *non performing loan* untuk mengukur tingkat risiko. Penelitian oleh (Smith et.al, 2003) menyimpulkan bahwa *fee based* mampu menurunkan risiko dari suatu bank karena semakin tinggi *fee based* berarti mengurangi ketergantungan bank dari pendapatan yang bersumber dari bunga.

H1: Fee Based Income berpengaruh negatif terhadap NPL

BOPO menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi. Menurut

Berger, et al (Kuncoro dan Suhardjono, 2002), bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat. Dengan efisiensi biaya yang baik, semakin kecil rasio BOPO maka kondisi bermasalah juga semakin kecil atau sebaliknya.

H2: BOPO berpengaruh positif terhadap NPL

Konsentrasi kepemilikan pada suatu bank diyakini memiliki dampak terhadap risiko bank yang bersangkutan. Paligorova (2009) menemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar

METODE PENELITIAN

Data dan Jenis Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah 54 bank BPR di DIY yang tersebar di Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Namun hanya terdapat 26 BPR yang memiliki data lengkap sehingga sisanya sebanyak 28 BPR tidak digunakan dalam pengolahan data. Pengamatan data dilakukan selama periode 2012-2016.

memberikan kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi karena kepemilikan yang tersebar menjadikan adanya keseimbangan kepentingan diantara para pemilik dan tersebarnya pihak pengendali kebijakan perusahaan. Selain itu konsentrasi kepemilikan juga dapat mempengaruhi risiko (*risk taking*) sebuah perusahaan. Kepemilikan dalam jumlah besar (dominan) oleh seseorang atau kelompok cenderung menginginkan kebijakan investasi yang konservatif mengingat besarnya risiko yang mungkin mereka terima akibat kepemilikan mereka yang besar itu Artinya, semakin terkonsentrasi kepemilikan di sebuah bank maka semakin tinggi *risk taking*-nya karena faktor monitoring yang lemah disebabkan para pemilik terkonsentrasi pada satu kelompok saja.

H3: Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif terhadap NPL

Definisi Operasional

a. Fee Based Income

Untuk mengukur diversifikasi bank penelitian ini akan menggunakan *fee based* dibagi *total revenue* sebagai proksi. Adapun unsur-unsur dalam laporan keuangan yang termasuk dalam hal ini adalah pendapatan: provisi dan komisi, laba transaksi surat berharga pendapatan non operasional.

b. BOPO

BOPO (Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio yang

menggambarkan efisiensi operasional adalah bunga yang perbankan dalam melakukan didapatkan dari nasabah. Semakin kegiatannya. Belanja operasional kecil nilai BOPO artinya semakin adalah biaya bunga yang efisien perbankan dalam diberikan pada nasabah beroperasi. BOPO dihitung sedangkan pendapatan dengan rumus sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

c. Konsentrasi Kepemilikan (KPM)

Konsentrasi kepemilikan yang merupakan ukuran sebaran kepemilikan suatu bank akan di ukur dengan menggunakan Hirschman-Herfindahl Index (HHI). Metode serupa juga digunakan oleh Fazlzadeh et,al (2011), Céspedes (2008). Adapun rumus Hirschman-Herfindahl index adalah sebagai berikut:

$$HHI = \sum_{i=1}^n s_i^2$$

Dimana S_i adalah proporsi kepemilikan pemilik saham dan n adalah jumlah pemegang saham. Jika nilai HHI mendekati 1 hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan semakin terkonsentrasi sebaliknya jika mendekati 0 menandakan kepemilikan semakin menyebar.

d. Non-Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL), yang merupakan perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat (Masyud, 2004). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 6/73/INTERN DPNP tgl 24 Desember 2004):

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Analisis Data

a. Pengujian Asumsi Klasik

Asumsi klasik pertama yang harus dipenuhi adalah **multikolinearitas**. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi kita dapat melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance* (TOL). Bila nilai TOL lebih kecil dari 0,10 atau nilai VIF lebih dari 10 maka terdapat gejala multikolinearitas yang

berbahaya dan begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2005).

Asumsi klasik berikutnya adalah **autokorelasi** yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) pada sebuah model regresi linear Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Runs Test*, yaitu menguji residual

model regresi. Model regresi dikatakan terdapat autokorelasi jika probabilitasnya signifikan pada 5% (Ghozali, 2005).

Pengujian asumsi klasik yang ketiga adalah uji **heterokedastisitas**. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji asumsi ini digunakan uji *Glejser* yaitu pengujian variabel independen terhadap nilai absolut dari residual

model regresi yang digunakan. Jika variabel independen signifikan secara statistik maka ada indikasi heterokedastik (Ghozali, 2005).

Pengujian asumsi klasik yang terakhir adalah pengujian **normalitas**. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan program SPSS. Residual dikatakan terdistribusi normal jika nilai probabilitas lebih besar dari 5%) (Ghozali, 2005).

b. Pengujian Hipotesis

Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$NPL = a + b_1 \text{Fee Based Income}_1 + b_2 \text{BOPO}_2 + b_3 \text{KPM}_3 + \varepsilon$$

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan (α) 0,05 atau 5% untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dengan cara menguji nilai F. Apabila nilai F positif berarti hipotesis diterima. Untuk menguji masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap kualitas hasil pemeriksaan dilakukan dengan menguji nilai t dengan uji dua sisi pada tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%. Kriteria pengujian yang digunakan adalah menerima hipotesis jika nilai t hasil perhitungan adalah positif signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Tabel 1. Deskripsi Data

	Min	Max	Mean	Std. Deviation
BOPO	0.75	0.84	0.78	0.02
Konsentrasi Kepemilikan	0.56	1.00	0.87	0.10
Fee Based Income	0.00	0.20	0.05	0.03
NPL	0.01	0.10	0.04	0.02

Pengujian Asumsi Klasik

Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

regresi sederhana yang menurut Gujarati (2003), setidaknya ada 4 asumsi penting yang harus dipenuhi

untuk sebuah model OLS yaitu **Autokorelasi, Multikolinearitas, Normalitas dan Heteroskedastisitas**. Oleh karena itu sebelum melakukan pengujian statistik pada masing-masing hipotesis dilakukan pengujian asumsi klasik.

Pengujian asumsi klasik pertama adalah autokorelasi dengan menggunakan **Runs Test**. Pengujian membuktikan data yang digunakan terbebas dari gejala autokorelasi karena uji statistiknya tidak signifikan pada 0.05.

Tabel 2 Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Z	-1,28
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,272

Uji asumsi klasik multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model regresi. Hasil pengujian menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 sedangkan nilai *tolerance* diatas 0,10 sehingga tidak ada indikasi multikolinearitas pada model regresi.

Tabel 3 Uji Multikolinieritas

Variabel	Pengujian	
	TOL	VIF
BOPO	0,979	1,021
Konsentrasi Kepemilikan	0,978	1,022
Fee Based Income	0,981	0,019

Uji normalitas untuk melihat apakah residual atau variabel pengganggu terdistribusi secara normal dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Tabel4 Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Kolmogorof-Smirnov Z	1,315
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,300

Pada tabel diatas terlihat model pengujian terbebas dari masalah normalitas atau data terdistribusi secara normal.

Asumsi klasik yang terakhir adalah heterokedastisitas yang akan diuji dengan metode yang digunakan Glejser. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengujinya digunakan pengujian variabel independen terhadap nilai absolut dari residual model regresi.

Tabel 5 Uji Heterokedastisitas

Variabel	Pengujian	
	t	Sig
BOPO	1,234	0.220
Konsentrasi Kepemilikan	1,304	0,195
Fee Based Income	-1,327	0,187

Pada tabel 4.5 dari hasil pengujian menunjukkan nilai absolut residual pada model terbebas dari gejala heterokedastisitas ditandai dengan hasil uji statistik yang tidak signifikan.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Tabel 6 Pengujian Statistik Hipotesis

Model	Koefisien	t	Sig.
(Constant)			0.000
BOPO	1.325	2.736	0.000
Konsentrasi Kepemilikan	-0.001	1.598	0.113
Fee Based Income	0.000	0.615	0.540
F		25.467	0.000
R Square		0.830	

Hipotesis pertama menyatakan bahwa tingkat risiko akan dipengaruhi oleh diversifikasi pendapatan (*Fee Based Income*) secara negatif atau semakin tinggi diversifikasi pendapatan maka semakin rendah risiko suatu bank dan sebaliknya. Pengujian hipotesis ini tidak mendukung dugaan ini karena nilai probabilitas 0.540 (> 0.05) yakni signifikan secara statistik. Diversifikasi tidak terbukti mampu mengurangi risiko bank BPR. Hal ini disebabkan karena kontribusi pendapatan diluar bunga pada BPR terbilang masing sangat rendah, yakni hanya berkisar 5% saja, dibandingkan pada bank umum yang rata-rata mencapai 20% - 30%. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sesuai undang-undang BPR memang memiliki batasan variasi operasi bisnisnya. Namun demikian, BPR juga perlu

berinovasi pada jenis pelayanan jasanya agar mereka tidak semata bergantung pada pendapatan dari sektor perkreditan sehingga mampu mempertahankan tingkat pendapatan yang memadai untuk membiayai seluruh operasional. Dengan kata lain risiko macetnya pemasukan dari bunga dapat diminimalisir dengan diversifikasi yang sekaligus bermanfaat untuk mengurangi profil risiko bank (Smith et.al, 2003).

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat risiko akan dipengaruhi secara positif oleh efisiensi operasional bank (BOPO). Pada variable BOPO koefisien memiliki tanda positif yang berarti semakin tinggi rasio efisiensi, semakin tinggi risiko bank. Temuan ini telah sejalan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta teori yang dikemukakan Berger, et al (Kuncoro

dan Suhardjono, 2002) yang mengatakan bahwa efisiensi operasional akan berdampak pada tingkat risiko bank. Jika suatu bank efisien terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa tingkat risiko akan dipengaruhi oleh Konsentrasi kepemilikan secara positif atau semakin terkonsentrasi pihak pengendali (mendekasi rasio 1 menurut Hirschman-Herfindahl Index) maka semakin tinggi risiko suatu bank dan sebaliknya. Pengujian pada hipotesis ini tidak mendukung dugaan awal karena nilai probabilitas 0.113 (> 0.05) yakni signifikan secara statistik. Konsentrasi kepemilikan tidak terbukti mampu mengurangi risiko bank BPR. Hal ini dapat terjadi karena hubungan antara tingkat konsentrasi kepemilikan dengan risiko juga tergantung dengan kondisi kebijakan tingkat penjaminan simpanan yang berlaku di Negara bersangkutan (Angkinand dan Wihlborg, 2007). Selain itu, Ismiyanti dan Mamduh (2003) juga menyatakan bahwa kepemilikan dengan jenis tertentu, yaitu kepemilikan manajerial berdampak signifikan terhadap tingkat risiko karena pengelola perusahaan yang juga memiliki saham di perusahaan akan menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan kepentingannya. Ketiadaan pertimbangan perbedaan kepemilikan pada penelitian ini mungkin menjadi salah satu alasan yang menyebabkan hasil pengujian pada penelitian ini tidak sesuai dengan harapan.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini memberikan hasil yang belum konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa risiko suatu bank dapat dipengaruhi oleh tingkat diversifikasi pendapatan dan konsentrasi kepemilikan. Namun demikian efisiensi operasional bank terbukti mampu meminimalisir risiko bank, dalam hal ini adalah risiko kredit.

Saran

Pada penelitian selanjutnya sebaiknya kelompok sampel penelitian perlu diperluas. Proksi risiko perlu dicoba menggunakan yang lain, seperti CAR maupun ukuran risiko-risiko yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Selain itu variabel kepemilikan juga masih memerlukan perluasan definisi dan ruang lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkinand, Apanard and Clas Wihlborg., 2011, "Implicit Guarantees, Governance and Banks' Risk-Taking in European Banks through the Crisis", University of Illinois, Springfield
- Atiqoh, Nourma., 2015. Pengaruh CAR, LDR, BOPO, Inflasi dan GDP Terhadap NPL (Studi Empiris Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bei Periode 2009-2013), Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie.
- Barus, Andreani Caroline dan Erick, 2016., Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank

- Umum Di Indonesia, *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*
- Céspedes, Jacelly., Maximiliano González and Carlos A. Molina., 2008, "Ownership Concentration and the Determinants of Capital Structure in Latin America", *FMA Annual Meeting Papers*
- Djohanputro, B., Kountur, R., (2007) *Non Performance Loan (NPL) Bank. Prekreditasi Rakyat, Laporan Penelitian, Bank Indonesia*
- Fazlzadeh, Alireza, Ali Tahbaz and Hendi Kazem Mahboubi., 2011, "The Examination of the Effect of Ownership Structure on Firm Performance in Listed Firms of Tehran Stock Exchange Based on the Type of the Industry". *International Journal of Business and Management*
- Ghozali, Imam. 2017. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Gujarati, Damodar. 2003. 'Basic Econometrics'. Fourth Edition. *The McGraw-Hill Companies*
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Kuncoro, Mudrajad & Suhardjo. 2002. *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta
- Lapoliwa. 2000. *Akuntansi Perbankan. Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Masyhud, Ali., 2004. *Asset Liability Management: Manyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional*, PT. Gramedia Jakarta
- Nugraha, Prathama., 2011. *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, dan Keterbukaan, Diversifikasi, Terhadap Risiko Bank*. Tesis Program Magister Sains Dan Doktor Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
- Paligorova, Teodora., 2009 "Corporate Risk-Taking and Ownership Structure", *Bank of Canada Working Papers series*
- Riyadi, Slamet. 2006. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sinungan, Muchdarsayah, 1994. *Strategi Manajemen Bank*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Smith, Rosie, Christos Staikouras and Geoffrey Wood., 2003. *Non-interest Income and Total Income Stability* Publications Group, Bank of England
- Tacneng, Ruth C., 2009, *Bank Diversification and Risk: Does Foreign Presence Matter?* Universite de Limoges, Limoges, France

**PENGARUH CELENGAN PADJEG TERHADAP KEPATUHAN WP DENGAN
MOTIVASI WP SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*
(Studi Kasus di Wilayah Kerja KPP Wonosari)**

Suyanto

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Jl. Kusumanegara No.121, Umbulharjo, Yogyakarta
iyant@ustjogja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Celengan Padjeg Program, on taxpayer compliance with taxpayer motivation as an intervening variable. The population used is 116 taxpayers who have received the Celengan Padjeg Program in the working area of KPP Pratama Wonosari with a total sample of 89 respondents and 80 questionnaires that can be processed. The analysis tool used is multiregression with path analysis as a method of analysis of mediation variables. The result, Celengan Padjeg Program can have a significant positive effect directly on taxpayers motivation but not for taxpayers compliance. In addition, taxpayers Motivation can have a significant positive effect on taxpayers compliance. Finally, the Celengan Padjeg Program can have a significant positive effect through taxpayers motivation on taxpayers compliance with taxpayers motivation as a significant intervening variable mediating the Celengan Padjeg Program on taxpayers compliance.

Keyword: *Celengan Padjeg Program, Compliance, Motivation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari warga negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu, pajak sebagai menunjang kepentingan negara maupun warga negara. Untuk itu, pemerintah mengimplementasikan program-program yang diharapkan mampu mengumpulkan lebih banyak pendapatan negara dari sektor pajak. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum (Lestari dkk, 2015).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam websitenya dapat diketahui

bahwa perkembangan pajak setiap tahunnya mulai dari tahun 2010-2011 mengalami penurunan sebesar 2, 26%, sedangkan pada tahun 2011-2012 mengalami kenaikan sebesar 1, 97, %, kemudian pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar 0, 75%, selanjutnya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014-1, 19%, dan yang terakhir adalah pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 0, 14% (bps.go.id data diolah 2017). Data dari Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa persentase pendapatan pajak tidak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah tidak dapat terpenuhi hal itu disebabkan inovasi yang diharapkan dapat mendongkrak motivasi Wajib Pajak (WP) dalam hal kepatuhan belum maksimal dan harus semakin ditingkatkan.

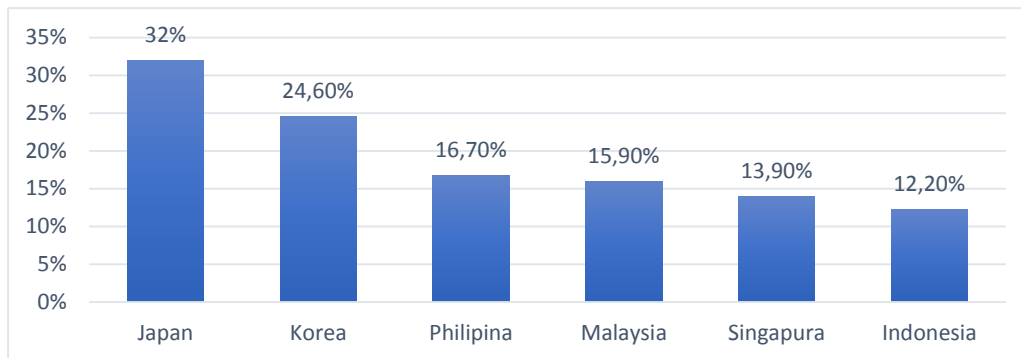
Meningkatkan *tax ratio* adalah dengan membuat WP termotivasi untuk membayar pajak. Apabila motivasi WP semakin tinggi, maka tingkat kepatuhan WP juga akan semakin tinggi. Hal ini

mampu mempengaruhi persentase *tax ratio* yang diharapkan dapat semakin meningkat.

Berdasarkan *Budget In Brief* APBNP 2016, *tax ratio* dalam arti luas membandingkan total nilai penerimaan perpajak (pajak pusat), penerimaan SDA

migas, dan pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan *tax ratio* dalam definisi sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

Grafik 1
Perbandingan *Tax Ratio* beberapa negara di Asia tahun 2015



Sumber: *Organisation for Economic Co-operation and Development (EOCD) 2017*

Pada Grafik 1 menunjukkan *tax ratio* Indonesia pada tahun 2015 paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yaitu 12,20% sedangkan Negara Singapura 13,90%, Negara Malaysia 15,90%, Negara Philipina 16,70%, Negara Korea Selatan 24,60%, dan Negara Jepang 32%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia terbilang rendah.

Program-program yang dicanangkan pemerintah dimaksudkan supaya WP termotivasi untuk membayar pajak. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi WP agar patuh membayar pajak. Oleh karenanya, pemerintah mencetuskan inovasi-inovasi baru yang dapat menarik minat WP. Salah satu inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari adalah dengan adanya Program *Celengan Padjeg*.

James and Alley (2002) mendefinisikan kepatuhan pajak mengacu pada kemauan individu untuk bertindak baik dalam menjalankan kewajiban

perpajakan baik ada atau tidaknya hukum dan administrasi perpajakan tanpa penerapan penegakan hukum. Saad (2014) mengatakan bahwa WP akan patuh apabila sistem dalam pembayaran pajak itu tidak komplek. Kepatuhan akan pembayaran pajak oleh WP khususnya di Kabupaten Gunungkidul terbilang rendah. Hal ini ditunjukkan pada presentase kepatuhan WP yang orang pribadi yang terdaftar dan WP orang pribadi yang menyampaikan SPT pada KPP Pratama Wonosari. Pada tahun 2015, jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari adalah sebanyak 5.349 WP. Jumlah WP wajib menyampaikan SPT 3.457 WP, namun hanya 1.476 WP yang melaporkan SPT tahunan atau sebesar 42,70% saja dari total keseluruhan WP yang wajib menyampaikan SPT.

Presentase WP Orang Pribadi yang menyampaikan SPT pada tahun 2012 adalah 54,48%, sedangkan tahun selanjutnya presentase realisasi penyampaian SPT mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar

42,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa, kepatuhan WP Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama mengalami penurunan. Penelitian ini semakin menarik dengan adanya fenomena penurunan kepatuhan WP di KPP Pratama Wonosari. Kepatuhan WP di KPP Pratama dari tahun ke tahun mengalami penurunan mungkin dikarenakan motivasi yang rendah dari WP, sehingga motivasi WP harus didukung dengan program-program yang dicanangkan pemerintah agar patuh membayar pajak. Motivasi berperan penting dalam meningkatkan kemauan WP dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian Mangoting dan Sadjarto (2013) menyatakan bahwa motivasi WP melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan SPT Tahunan, semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak.

KPP Pratama Wonosari membuat suatu inovasi baru agar WP termotivasi dalam membayar pajak. Inovasi inilah yang sekiranya tidak lagi menjadi momok bagi

WP. Faktor motivasi WP yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak khususnya bagi WP orang pribadi yang berwirausaha, perlu dikaji dan diteliti lebih dalam demi pengembangan inovasi yang mampu mendongkrak motivasi WP. Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini disusun dengan judul Pengaruh *Celengan Pajak* terhadap Kepatuhan WP dengan motivasi sebagai variabel Intervening.

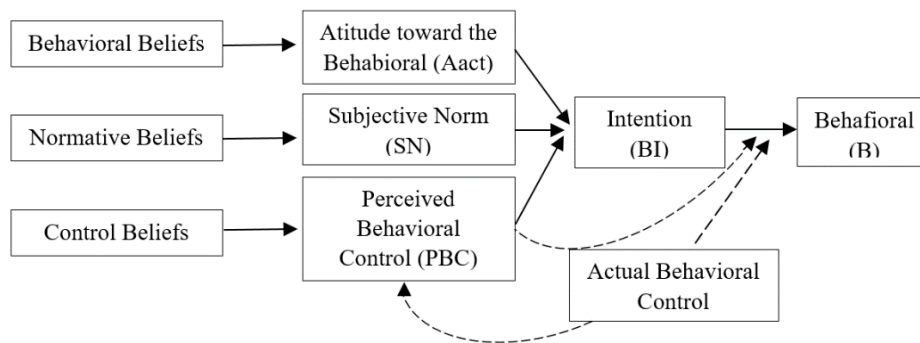
TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Kepatuhan WP

Literatur dalam Ilmu Psikologi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan WP, dapat dijelaskan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan untuk mengkaji perilaku WP yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk patuh terhadap semua peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Gambar 1
Model Theory of Planned Behavior (TPB)



Sumber: Ajzen, I. (2006) *The theory of planned behavior*
<http://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html> diakses 2017

Berdasarkan model TPB dalam Ajzen (2006), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*,

yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu

terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan memiliki arti bahwa adanya suatu perasaan dan tindakan untuk mematuhi, tunduk dan menjalankan suatu ajaran atau peraturan yang ada. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mandagi dkk (2014) Kepatuhan WP merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Hal ini Sesuai dengan Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan bahwa WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa WP berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu, menurut Mustofa dkk (2016) Kepatuhan WP adalah sejauh mana WP dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan.

Practice Note tentang *Compliance Measurement* yang diterbitkan oleh OECD (2017), kepatuhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) kepatuhan administratif

(*administrative compliance*); dan (2) kepatuhan teknis (*technical compliance*). Kepatuhan administratif mencakup kepatuhan pelaporan dan kepatuhan prosedural. Sedangkan kepatuhan teknis mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh WP. Menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013), kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 1) kepatuhan pajak formal dan 2) kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat WP secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan WP patuh serta WP yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria adalah: (a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir; (b) dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; (c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; (d) tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak (1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak (2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; (e) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) tahun terakhir; dan (f) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak; artinya kebijakan pajak berorientasi tujuan akan menghasilkan peningkatan kepatuhan pajak dan bahwa penggunaan pajak yang efektif dan maksimal oleh pemerintah akan meningkat secara signifikan tingkat kepatuhan pajak di Negara Bagian Bayelsa. Disimpulkan bahwa kebijakan pajak yang berorientasi pada tujuan dan penggunaan pajak yang bijaksana merupakan faktor penting dalam kepatuhan WP Kiabel (2014).

Banyak penelitian yang telah meneliti mengenai kepatuhan WP, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dkk, (2016), Suyanto dan Putri (2017), serta Rahayu (2017) yang berfokus pada program *Tax Amnesty*. Bukan hanya *Tax Amnesty*, banyak faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan WP, menurut Oktafiyanto dan Wardani (2015) serta Suyanto dan Trisnawati (2016) kesadaran dapat mempengaruhi kepatuhan WP. Pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan WP yang didasarkan pada penelitian yang dilakukakn Oktafiyanto dan Wardani (2015), Intansari dan Suyanto (2016), serta Suyanto dan Intansari (2017). Wardani dan Rumiyatun (2017) juga mengungkapkan bahwa sanksi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Motivasi WP

Pada umumnya manusia akan bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya. Niat wajib pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh. Patuh merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan atau keputusan untuk

berperilaku patuh pada ketentuan perpajakan. Kecenderungan adalah tendensi pribadi wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Menurut Freddy (2014) motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Motivasi dapat pula dinyatakan sebagai proses psikologis yang terjadi karena interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan pemecahan persoalan. Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri seseorang manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif.

Motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh WP merupakan sesuatu yang timbul dari dalam benak WP untuk selalu dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tanpa terbesit sedikitpun dalam benak mereka untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya (Caroko, 2015). Penelitian yang dilakukan Dwenger, dkk (2016), kepentingan relatif motivasi ekstrinsik dan intrinsik untuk kepatuhan pajak pada sampel perwakilan WP Jerman yang besar. Dalam penelitian tersebut menjelaskan setiap motivasi dan interaksinya dengan menggunakan manipulasi-manipulasi, penyederhanaan pajak, mispersepsi, dan penghargaan/ pengakuan.

Program Celengan Padjeg

Celengan merupakan nama sebuah kotak atau wadah atau sarana yang biasa digunakan untuk menyimpan dan menabung koin. Menurut Wikipedia Indonesia Bebas Celengan merupakan nama umum untuk kotak akumulasi atau penabungan koin. Seperti halnya celengan, Program Celengan Padjeg adalah

implementasi inovasi yang diluncurkan oleh KPP Wonosari guna meringankan beban WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. KPP Wonosari memberikan Celengan Padjeg kepada pelaku UMKM secara Cuma-Cuma. Program ini diharapkan dapat menjadi model untuk meringankan beban WP. WP setiap hari diwajibkan memasukan 1% dari peredaran bruto, setelah terakumulasi satu bulan uang tersebut digunakan untuk membayar pajak. Program ini diluncurkan ditujukan bagi WP Orang Pribadi yang menalakan suaha dalam bentuk Usaha Kecil dan Menengah Pengusaha Non Karyawan atau pelaku UMKM.

Suyanto dan Trisnawati (2016) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP, sedangkan Program Celengan Padjeg memperkuat pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP. Penelitian yang dilakukan oleh Intansari dan Suyanto (2016) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP, sedangkan Program Celengan Padjeg memperkuat

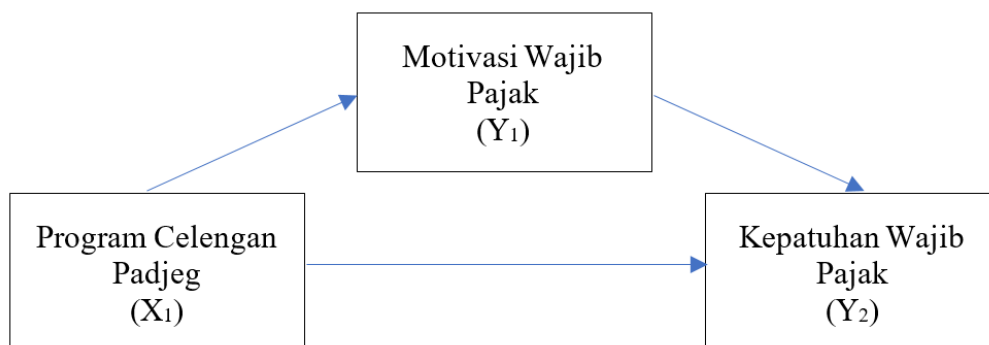
pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP.

Kerangka Pikir

Mengingat pendapatan negara dari sektor pajak memiliki pengaruh tinggi terhadap kemampuan perekonomian negara, maka peneliti akan menguji tentang kepatuhan WP. Kepatuhan WP dipengaruhi oleh program maupun stimulus yang dapat meningkatkan motivasi WP untuk patuh. KPP Pratama Wonosari telah memberikan stimulus bagi WP khususnya UMKM agar dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Stimulus tersebut adalah Program Celengan Padjeg.

Program Celengan Padjeg sebagai variabel independen berinteraksi dengan motivasi WP sebagai variabel intervening serta kepatuhan WP sebagai variabel dependen. Variabel intervening yaitu motivasi WP berinteraksi terhadap kepatuhan WP. Berikut ini merupakan tampilan kerangka pemikiran secara skematis:

Gambar 2
Kerangka Pikir



Pengembangan Hipotesis Pengaruh Program Celengan Padjeg terhadap Motivasi dan Kepatuhan WP

Suyanto dan Trisnawati (2016) menjelaskan bahwa dengan adanya Program Celengan Padjeg WP akan dimudahkan karena program ini mengajak WP menabung 1% dari omset mereka dihari itu dan setelah terkumpul selama

sebulan baru disetorkan semua yang ada di dalam celengan tersebut ke bank persepsi atau kantor pos. Adanya Program Celengan Padjeg mampu meringankan beban mental WP, hal ini terjadi karena WP menyisihkan 1% atas omset disetiap harinya agar ketika masa perbayaran pajak berlangsung WP tidak kesulitan mendapatkan dana karena telah menyisihkan 1% penghasilannya

setiap hari. Dengan demikian Program Celengan Padjeg mampu menjadi media agar WP khususnya WP Orang Pribadi yang berwirausaha termotivasi untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Suyanto dan Trisnawati (2016), Intansari dan Suyanto (2016), serta Suyanto dan Intansari (2017) telah membuktikan bahwa Program Celengan Padjeg mampu memperkuat pengaruh kesadaran dan pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan dan Motivasi WP. Dari ulasan di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Program Celengan Padjeg berpengaruh positif terhadap motivasi WP.

H2: Program Celengan Padjeg berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Pengaruh Motivasi WP Terhadap Kepatuhan WP

Motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan perilakunya untuk mencapai tujuan tertentu. Caroko dkk (2015) motivasi WP adalah daya dorong yang ada pada WP secara eksternal maupun internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri hingga membayarkan pajak terutang.

Nuzula dkk (2015) memaparkan bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan suatu syarat utama untuk mendukung pelaksanaan *self assesment system* dimana WP bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Gangl dkk (2015) menjelaskan bahwa motivasi yang dipaksakan berhubungan negatif dengan kepatuhan pajak, sedangkan motivasi yang berkomitmen berhubungan positif dengan kepatuhan. Bertolak belakang dengan harapan, motivasi sukarela tidak terkait dengan kepatuhan pajak.

Motivasi WP mampu meningkatkan kepatuhan WP khususnya WP Orang Pribadi yang berwirausaha, sehingga penerimaan negara dalam sektor pajak

semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Gunungkidul sendiri.

H3: Motivasi WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP

Pengaruh Program Celengan Padjeg Terhadap Kepatuhan WP Melalui Motivasi WP

Suyanto dan Intansari (2017) telah membuktikan bahwa Program Celengan Padjeg dapat memperkuat pengaruh pelayanan fiskus terhadap motivasi WP. Apabila WP mendapatkan stimulus yang dapat meringankan beban pembayaran pajak, maka WP akan termotivasi untuk patuh dalam membayar pajak. Pengaruh motivasi terhadap perilaku secara teoritis dapat dibahas melalui kajian struktur (*content theory*), dan kajian proses (*process theory*). *Content theory* menitikberatkan kepada faktor-faktor yang melekat pada individu yang dapat menimbulkan, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. *Process theory*, menjelaskan dan menganalisa bagaimana perilaku dimunculkan, diarahkan, dipertahankan dan dihentikan. Dari pembahasan *content theory*, kepatuhan WP sangat terkait dengan kepentingan atau kebutuhan yang harus terpenuhi, kebutuhan WP adalah menghitung besarnya pajak yang pantas. Pajak yang pantas adalah besarnya pajak yang secara yuridis tidak melanggar peraturan perpajakan dan secara ekonomis tidak memberatkan keuangan WP (Sitorus dan Fauziyati, 2016).

Kepatuhan WP akan meningkat dengan adanya motivasi yang timbul dari stimulus yang lebih memudahkan dan meringankan beban membayar pajak bagi WP. Dengan ulasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

H4: Program Celengan Padjeg berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WP melalui Motivasi WP.

METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan WP, Program Celengan Padjeng, dan Motivasi WP. Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

Kepatuhan WP

Dalam penelitian ini, variabel ini akan diukur menggunakan *likert scale 5 point* mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berikut merupakan ringkasan definisi operasional Kepatuhan WP:

Tabel 2
Definisi Operasional Kepatuhan WP

Variabel	Definisi Operasional	Sub Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan WP (Y ₂)	Kepatuhan pajak adalah keadaan saat WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Mangoting dan Sadjiarto, 2013)	Kepatuhan pajak formal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendaftarkan diri sebagai WP. 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya. 3) WP menghitung pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) WP tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 	Ordinal
		Kepatuhan pajak material.	<ol style="list-style-type: none"> 5) WP melakukan pembayaran sesuai dengan besaran pajak yang terutang. 6) WP melakukan pembayaran di tempat yang ditunjuk Ditjen Pajak. 7) WP telah mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menyampaikannya tepat waktu. 8) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. 	

(KMK No. 235/KMK.03/2003)

Motivasi WP

Dalam penelitian ini, variabel ini akan diukur menggunakan *likert scale 5 point* mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berikut merupakan ringkasan definisi operasional Motivasi WP.

Tabel 3
Definisi Operasional Motivasi WP

Variabel	Definisi Operasional	Sub Variabel	Indikator	Skala
Motivasi WP (Y₁)	Motivasi adalah rangsangan, dorongan yang dimiliki WP untuk memenuhi kewajiban sebagai WP sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Sulistiyono, 2012).	Internal	1) Pengabdian WP kepada negara. 2) Bentuk sumbangsih dan gotong royong WP kepada negara. 3) Pajak merupakan penunjang infrastruktur bagi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.	Ordinal
		Eksternal	4) Media dalam mengisi SPT yang mudah dan efisien bagi WP. 5) Media pembayaran pajak yang mudah dan efisien bagi WP. 6) Sarana pengakumulasian dan penyisihan sebagian penghasilan yang akan dibayarkan. 7) Penghargaan kepada WP yang patuh membayar Pajak. 8) (Suyanto dan Intansari, 2017)	

Program Celengan Padjeg

Dalam penelitian ini, variabel ini akan diukur menggunakan *likert scale 5 point* mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berikut merupakan ringkasan definisi operasional Program Celengan Padjeg.

Tabel 4
Definisi Operasional Program Celengan Padjeg

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Program Celengan Padjeg (X₁)	Celengan Padjeg adalah sarana untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk membayar pajak pengasilan (Suyanto dan Trisnawati, 2016)	1) WP mengetahui adanya Program Celengan Padjeg. 2) WP mendukung adanya Program Celengan Padjeg. 3) WP memahami fungsi Program Celengan Padjeg. 4) WP memanfaatkan celengan padjeg sesuai dengan fungsinya (Suyanto dan Trisnawati, 2016)	Ordinal

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013). Lingkup populasi pada penelitian ini adalah seluruh WP yang berada di wilayah kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Sampai dengan tahun 2015, jumlah WP tercatat sebanyak 3.589 dengan terdapat 116 WP di Kecamatan Wonosari yang telah memperoleh celengan padjég. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah WP Orang Pribadi yang berwirausaha yang telah menerima celengan padjég. Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan Michael, untuk tingkat kesalahan, 1%, 5%, dan 10% (Sugiyono, 2013). Berdasarkan Isaac dan Michael, sampel yang dapat diambil dari populasi dengan persen kelonggaran ketidaktelitian dalam pengambilan sampel (e) sebesar 5% adalah sebanyak 89 sampel.

Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik

Uji kualitas data dilakukan setelah pilot test dinyatakan lolos dan kuesioner disebar kembali. Dalam penelitian ini, data telah lolos uji kualitas data dengan menggunakan pengujian uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov Smirnov dengan nilai *Asymp. Sig.(2-Tailed)* sebesar 0,164 yang berarti data terdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Uji Glejser dengan hasil 0,223

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Data Umum

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 89 responden dari seluruh populasi WP sebanyak 116 orang yang telah menerima Celengan Padjég di

untuk Program Celengan Padjég dan 0,634 untuk Motivasi WP, yang berarti data dinyatakan homogen. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan skor Tolerance dan VIF, hasilnya data tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menggunakan model analisis jalur (*Path Analysis*) dengan metode *multiregression* yang selanjutnya dilakukan *Sobel Test* untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien mediasi. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Motivasi (Y_1) = $\alpha + p_2$ Program Celengan Padjég + e_1
- 2) Keptuhan (Y_2) = $\alpha + p_1$ Motivasi + p_2 Program Celengan Padjég + e_1

Keterangan:

p = menggambarkan jalur dan koefisien jalur (Ghozali, 2011).

e = merupakan jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel dependen (Ghozali, 2011).

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai katuat dapat diukur dari *Goodness of Fit*. Secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t (Ghozali, 2011).

Kecamatan Wonosari. Penyebaran koesioner dilakukan pada tanggal 29 April 2016 sebanyak 35 koesioner, sedangkan sisanya disebar pada tanggal 30 April 2016. Total koesioner yang disebar adalah sebanyak 89 koesioner, kuesioner yang tidak kembali adalah sebanyak 4 kuesioner dan 5 kuesioner tidak sah. Sehingga, kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 80 kuesioner.

Gambaran Umum Responden

Demografi responden merupakan gambaran umum responden yang meliputi: (1) jenis kelamin, (2) usia, (3) jenis usaha, (4) pendidikan terakhir. Jumlah responden perempuan adalah sebanyak 56, 48 %. Responden paling banyak mengisi kuesioner adalah responden yang berusia 20 – 30 tahun sebesar 64,70% dan sisanya adalah responden dengan usia lebih dari 31 tahun. Jenis usaha toko kelontong mendominasi dalam prosentase responden sebanyak 23,52% sedangkan sisanya adalah toko bangunan, oleh-oleh, persecetakan dan fotocopy dan lainnya. Pendidikan responden adalah mayoritas setingkat SMA/MA/SMK Sederajat sedangkan sisanya adalah D3, S1, dan lainnya.

Hasil Uji Statistik

Berdasarkan uji statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa nilai minimum pernyataan responden adalah 8 untuk Program Celengan Padjeg, 17 untuk Motivasi WP, dan 25 untuk Kepatuhan WP. Nilai maksimum pernyataan responden adalah sebesar 20 untuk Program Celengan Padjeg, 35 untuk Motivasi WP, dan 45 untuk Kepatuhan WP. Nilai rata-rata dan standar deviasi untuk Program Celengan Padjeg adalah 13,6375 dan 2,63493, Motivasi WP memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi sebesar 27,0875 dan 3,76928, serta nilai rata-rata dan standar deviasi untuk Kepatuhan WP adalah sebesar 33,8625 dan 4,91637.

Tabel 5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Celengan Padjeg	80	8,00	20,00	13,6375	2,63493
Motivasi	80	17,00	35,00	27,0875	3,76928
Kepatuhan	80	25,00	45,00	33,8625	4,91637

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Hasil Uji Hipotesis dan Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6
Hasil Uji Multiregression

Model Regresi	Hasil Output							
	β	Std. Error	Parsial		R^2	Simultan		
			t	Sig.		F	Sig.	
1 X ₁ Y ₁	0,639	0,145	4,410	0,000	0,200	19,451	0,000	
2 X ₁ Y ₂	0,088	0,190	0,464	0,644	0,359	21,562	0,000	
	Y ₁	0,752	0,133	5,653	0,000			

Keterangan:

X₁ : Program Celengan Padjeg

Y₁ : Motivasi Wajib Pajak

Y₂ : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa Program Celengan Padjeg berpengaruh secara langsung dan secara parsial terhadap motivasi WP dengan nilai t hitung sebesar 4,410 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,990 yang signifikan pada 0,000, namun

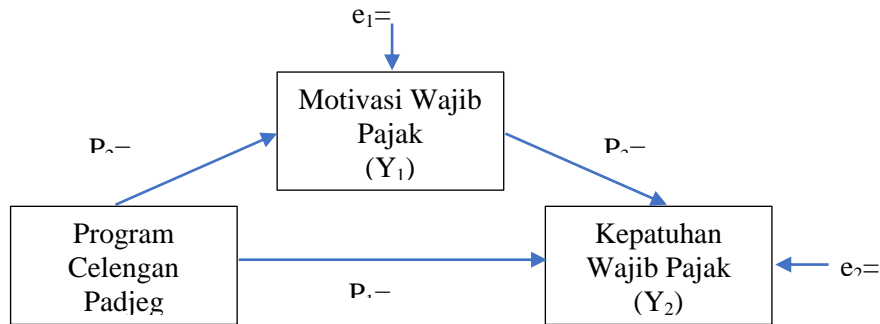
tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP karena t hitung sebesar 0,464 yang lebih kecil dari t tabel dan tidak signifikan pada angka 0,644. Motivasi WP berpengaruh secara langsung dan secara parsial terhadap Kepatuhan WP yang didasari oleh nilai t

hitung sebesar 5,653 lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, H1 dan H3

terdukung oleh data, sedangkan H2 tidak terdukung oleh data.

Hasil Uji Analisis Jalur (Path Analysis)

Gambar 3
Hasil Uji Analisis Jalur (Path Analysis)



Setelah uji multiregression dilakukan, maka didapatkan skema perhitungan uji analisis jalur (*path analysis*) seperti gambar di atas. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Program Celengan Padjég tidak berpengaruh langsung ke Kepatuhan WP dan dapat berpengaruh tidak langsung ke Kepatuhan WP melalui Motivasi WP sebagai variabel intervening. Besar pengaruh langsung adalah sebesar 0,088

Pengaruh mediasi sebesar 0,480 bisa dinyatakan signifikan atau tidak, dapat

sedangkan besar pengaruh tidak langsung adalah dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $0,639 \times 0,752 = 0,480$ atau total pengaruh Program Celengan Padjég ke Kepatuhan WP adalah $0,088 + 0,480 = 0,568$. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Program Celengan Padjég terhadap Kepatuhan WP melalui Motivasi WP lebih besar dari pengaruh langsung. Dengan demikian, Motivasi WP dapat menjadi variabel intervening. ditunjukkan dengan uji *Sobel Test* sebagai berikut:

Menghitung standar eror dari koefisien indirect effect (S_{p2p3}):

$$S_{p2p3} = \sqrt{p3^2 Sp2^2 + p2^2 Sp3^2 + Sp2^2 Sp3^2}$$

$$S_{p2p3} = \sqrt{(0,752)^2 (0,145)^2 + (0,639)^2 (0,133)^2 + (0,145)^2 (0,133)^2}$$

$$S_{p2p3} = \sqrt{(0,565)(0,021) + (0,408)(0,017) + (0,021)(0,017)}$$

$$S_{p2p3} = \sqrt{0,011 + 0,006 + 0,0003}$$

$$S_{p2p3} = 0,0173$$

Berdasarkan hasil S_{p2p3} di atas, dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3} = \frac{0,480}{0,0173} = 27,745 > 1,991 \text{ (t tabel)}$$

Hasil dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar 27,745 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,991. Itu berarti bahwa

koefisien mediasi dinyatakan signifikan. Dengan demikian, H4 terdukung oleh data.

Hasil Uji Simultan

Berdasarkan pada tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 1 dan model regresi 2 berpengaruh secara simultan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan F hitung sebesar 19,451 untuk model regresi 1 dan 21,562 model regresi 2 yang keduanya lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,723.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 6 hasil uji koefisien determinasi pada model regresi 1 adalah sebesar 0,200 atau 20% Program Celengan Padjeg berpengaruh terhadap Motivasi WP. Sedangkan model regresi 2 adalah sebesar 0,359 yang berarti 35,6% Program Celengan Padjeg dan Motivasi WP berpengaruh terhadap Kepatuhan WP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwasannya Program Celengan Padjeg dapat berpengaruh secara positif terhadap motivasi WP sehingga H1 terdukung namun tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan WP maka H2 tidak terdukung, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Intansari dan Suyanto (2016) serta Suyanto dan Intansari (2017). Namun, Suyanto dan Trisnawati (2016) tidak mendukung hasil H2, karena di dalam penelitiannya menghasilkan bahwa Program Celengan Padjeg berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan WP.

Motivasi WP dapat berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WP maka H3 terdukung oleh data, kesimpulan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suhartini, dkk (2015). Program Celengan Padjeg dapat berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WP melalui motivasi WP serta motivasi WP signifikan menjadi variabel mediasi, dengan demikian H4 terdukung.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan keterbaruan berupa variabel diluar penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data didapat menggunakan kuesioner, maka bisa terjadi perbedaan persepsi responden dengan peneliti sehingga mengakibatkan hasil penelitian ini bias. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan metode penelitian dengan menggunakan metode yang dapat meminimalisasi ketidakselarasan persepsi peneliti dan responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2006). *Theory of Planned Behavior*.
<http://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html> diakses 2017.
- Ajzen, I., 1991. *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, pp. 179–211.
- Budget In Brief* APBNP 2016
<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf> diakses 2016.
- Caroko, Bayu, dkk. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi WP Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1.
- Dwenger, Nadja et al. 2016. *Extrinsic and Intrinsic Motivations for Tax Compliance: Evidence from a Field Experiment in Germany*. *American Economic Journal: Economic Policy* 2016, 8(3): 203–232
- Freddy, Daulat. 2013. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi WP Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*. *Jurnal Ekonomi*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2013.
- Gangl, Katharina, et al. 2015. *Taxpayers' Motivations Relating to Tax Compliance: Evidence from Two Representative Samples of Austrian and Dutch Self-Employed Taxpayers*. *Journal of Tax Administration* Vol 1:2 pp 15 – 25.
- Ghozali, Imam. 2011. *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- <http://bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1178> (diakses pada 24 Februari 2017 pukul 16:12 WIB)
- Intansari, Pasca Putri Lopian Ayu, dan Suyanto. 2016. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Program Celengan Padjeg Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari)*. Prosiding Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Intansari, Pasca Putri Lopian Ayu, dan Suyanto. 2016. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Program Celengan Padjeg Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari)*. Prosiding Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- James, S., & Alley, C. (2002). *Tax compliance, self assessment system and tax administration*. *Journal of Finance, and Management in Public Services*, 2(2), pp 27 – 42.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/Kmk.03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/Kmk.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*

- Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?.* (Jakarta: Erlangga).
- Lestari, Ni Nyoman Sri Ayu Lestari dkk. 2015. *Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.* E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Vol 3 Tahun 2015.
- Mandagi, Chorras dkk. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado.* Jurnal EMBA Vol. 2 No.3 September 2014.
- Mangoting, Yenni dan Arja Sadjiarto. 2013. *Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 15, No. 2, November 2013, pp 106-116.
- Mustofa, Fauzi Achmad Dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).* Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 2016.
- Nuzula, Firdauzie dkk. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kab. Kediri).* Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB) Vol. 6 No. 2 2015.
- Oktaviyanto, Imam dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. *Pengaruh Pemahaman WP, Kesadaran WP, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP Bumi Dan Bangunan.* Jurnal Akuntansi Vol. 3 No.1.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (EOCD)* http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oced/taxation/revenue-statistics-in-asian-countries-2017_9789264278943-en#page58 diakses 2017.
- Rahayu, Nurulita. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan WP.* Jurnal Akuntansi Dewantara, Volume 1, Nomor 1.
- Saad, Natrah. 2014. *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View.* Procedia - Social and Behavioral Sciences 109. pp 1069 – 1075
- Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku Satu Edisi Empat.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sitorus, Riris Rotua Dan Intan Fauziyati. 2016. *Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening.* Media Akuntansi Perpajakan Vol. 1, No. 2
- Sugiyono. 2013. *Statistin Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, Dini, dkk. 2015. *Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening (Kajian Empiris Di*

- Kpp Madya Kota Pekanbaru*). JOM. FEKON Vol. 2 No. 1 pp 1 – 16.
- Suyanto dan Ika Septiani Putri. 2017. *Pengaruh Persepsi WP Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1.
- Suyanto dan Pasca Putri Lopian Ayu Intansari. 2017. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Motivasi WP Dimoderasi Oleh Program Celengan Padjeg*. Jurnal Akuntansi Dewantara Volume 1 Nomor 1 April 2017.
- Suyanto, dan Endah Trisnawati. 2016. *The Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town*. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Volume 10, Nomor 1.
- Suyanto, dkk. 2016. *Tax Amnesty*. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 2.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan WP, Kesadaran WP, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1.
- Widorini, Stefani Galuh dan Joko Purwanto Nugroho. 2014. *Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Yogyakarta*. EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI GUNUNGGKIDUL

Putri Utami, Vidya Vitta Adhivinna

Universitas PGRI Yogyakarta

Jl. PGRI 1 Sonosewu No. 117, Yogyakarta

putami687@gmail.com, adhivinna@upy.ac.id

ABSTRACT

Accounting information is very important thing in business activities or government. Accounting information is used as decision making in organization. The purpose this research to analyze affect relevant information, reliable information, complete information, timely information, understandable information toward quality accounting information at Organisasi Perangkat Daerah (OPD) in Gunungkidul.

This Research is quantitative research with purposive random sampling technique. Employee population 11 Dinas that use Accounting Information, the sample of wich was obtained 68 people. The analysis technique used is multiple regression analysis.

The result of the research shows that partially relevant information valuable 0,000 and complete information valuable 0,000 smaller than 0,05 has an effect on quality accounting information, while reliable information valuable 0,351 , timely information valuable 0,574 and understandable information valuable 0,680 greather than 0,05 no effect on quality accounting information. But simultaneously relevant information, reliable information, timely information, complete information and understandable information affect the performance of accounting information valuable 0,000 greather 0,05.

Keywords: *relevant information, reliable information, complete information, timely information, understandable information, quality accounting information.*

PENDAHULUAN

Informasi merupakan sumber daya yang sangat bernilai bagi sebuah organisasi dalam setiap transaksi, karena proses kegiatan mampu berjalan dengan efektif dan efisien dengan dukungan informasi yang baik. Perkembangan organisasi pemerintah yang semakin kompleks menyebabkan ketergantungan manusia terhadap informasi yang

semakin bertambah (Agustina dan Nur, 2015).

Informasi akuntansi merupakan hal yang vital dalam kegiatan bisnis ataupun pemerintahan. Informasi akuntansi digunakan sebagai pengambil keputusan didalam organisasi (atasan, dan orang yang konsen terlibat dalam organisasi),

digunakan sebagai pengambil keputusan diluar organisasi, maupun kreditor.

Menurut Bodnar dan Hopwood (2003) kualitas informasi merupakan tingkat dari sebuah data yang telah diproses oleh sistem informasi menjadi memiliki arti bagi penggunanya, yang bisa berupa fakta dan suatu nilai yang bermanfaat. Data merupakan input bagi sebuah informasi, sedangkan informasi adalah output yang dihasilkan. Perbedaan antara data dan informasi, data adalah berbagai fakta yang akan atau mungkin tidak diproses (diedit, diringkas dan diperbaiki) dan tidak memiliki pengaruh langsung atas pengguna, sedangkan informasi menyebabkan pengguna mengambil tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan, karena dikatakan sebagai informasi ditentukan berdasarkan pengaruhnya terhadap penggunaannya bukan terhadap bentuk fisiknya (Hall, 2004).

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Perangkat Daerah pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diperbarui dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan menggantinya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adanya perubahan peraturan tersebut membuat Kabupaten Gunungkidul membuat Peraturan Daerah No. 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. OPD dibagi menjadi dua yaitu,

pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.

Proses akuntansi atau tata keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan keuangan. Institusi-institusi pemerintahan saat ini, harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi (Andriani, 2010).

Penelitian Aditya (2014) dan Rusnanto (2014) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas informasi akuntansi dapat meningkatkan strategi dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang tepat dan mewujudkan tujuan organisasi pada Rumah Sakit Daerah Ungaran dan PKU Muhammadiyah Eks-Karisidenan Surakarta. Menurut Romney (2006) karakteristik informasi yang berkualitas adalah, informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu dan dimengerti. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kualitas informasi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Persamaan Penelitian
 - a. Sama-sama meneliti tentang kualitas informasi akuntansi
 - b. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengukurannya dengan skala likert,
2. Perbedaan Penelitian
 - a. Penelitian Rusnanto (2016) meneliti pada

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Eks-Karisidenan Surakarta dan Aditya (2014) melakukan penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah di Unggaran.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kualitas informasi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gunungkidul.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Teori

1. Kualitas Informasi Akuntansi

Kualitas informasi adalah kualitas keluaran (*output*) informasi yang diberikan oleh sistem. Atkinson *et. all*, dalam Widarsono (2007), menjelaskan bahwa informasi yang dihasilkan dari sistem informasi dapat digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi dari unit organisasi dalam perusahaan.

Informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajer harus informasi yang memiliki kualitas atau karakteristik informasi yang baik sehingga pengambilan keputusan tepat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Romney *et al*, (2006) menyatakan indikasi dari kualitas informasi akuntansi adalah mengurangi ketidakpastian, mendukung keputusan, mendorong untuk lebih baik dalam hal perencanaan aktivitas kerja. Kualitas informasi akuntansi dapat diukur

dengan kepuasan pengguna informasi akuntansi.

Menurut Mulyanto (2009) Parameter untuk mengukur nilai informasi (*value of information*) ditentukan dari manfaat (*benefit*) dan biaya (*cost*), tetapi pada kenyataannya informasi dengan biaya tinggi belum tentu memiliki manfaat yang tinggi. Sebuah informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibanding dengan biaya untuk mendapatkannya dan sebagian informasi tidak dapat ditaksir dengan keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dengan nilai efektivitasnya.

2. Informasi yang relevan

Menurut Krismiaji (2002) informasi akuntansi yang relevan dapat menambah pengetahuan atau nilai bagi para pengambil keputusan untuk mengurangi ketidakpastian, menaikkan kemampuan untuk memprediksi, menegaskan atau

membenarkan espektasi semula. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Informasi yang terpercaya

Romney *et. all* dalam Widarsono (2007), berpendapat bahwa informasi dikatakan terpercaya bila dia bebas dari kesalahan dan bias, serta secara akurat menjelaskan kejadian atau aktivitas organisasi. sumber informasi harus dapat dipercaya; artinya, informasi tersebut diperoleh dengan cara dan dari sumber yang tepat, kemudian diproses dengan cara yang benar, dan didistribusikan dengan cara yang juga dapat dipercaya.

4. Informasi yang lengkap

Informasi dikatakan lengkap atau utuh bila tidak meninggalkan aspek- aspek penting yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah (Romney, 2006).Informasi yang lengkap harus memenuhi kualitas dan kuantitas sesuai dan memenuhi kebutuhan pemakai informasi sehingga pemakai dapat mendapatkan informasi yang mereka cari.

5. Informasi yang tepat waktu

Menurut Aditya (2014) Informasi dikatakan tepat waktu apabila informasi tersedia pada waktu para pengambil keputusan menggunakannya untuk membuat keputusan. Ketepatan waktu memiliki dua segi yang berkaitan yaitu: frekuensi dan hambatan. Frekuensi menunjukkan seberapa sering informasi dimutakhirkan dan diukur selama interval waktu antara dua laporan berturut-turut untuk informasi yang serupa. Keterlambatan (*delay*) adalah lamanya waktu yang berlalu setelah suatu peristiwa terjadi sampai informasi yang bersangkutan sampai pada pemakai.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu, dimengerti, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas informasi akuntansi.

2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan/ pegawai 11 Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gunungkidul.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling* .Sampel penelitian ini adalah bagian administrasi umum dan keuangan sebanyak 68 orang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah metode purposive, dimana data penelitian disebarkan dengan kuesioner yang diserahkan kepada 11 Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gunungkidul.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SPSS for Windows* 16.00. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan

untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2016).

- a. Uji t (parsial)
- b. Uji F (Simultan)
- c. R^2 (Koefisien Determinasi)

Rumus Persamaan Uji regresi linear berganda adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

α = Konstanta

Y = Kualitas Informasi Akuntansi

X_1 = Informasi yang relevan

X_2 = Informasi yang terpercaya

X_3 = Informasi yang lengkap

X_4 = Informasi yang tepat waktu

X_5 = Informasi yang dimengerti

ε = Error

5. Uji Kualitas Data

Uji Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil dari *Cronbach Alpha Coefficient*. Suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih.

6. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Regresi Linear berganda meliputi:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Data Penelitian

Responden penelitian ini adalah 68 Perangkat Daerah (OPD) di karyawan bagian administrasi umum dan Gunungkidul. Berikut ini adalah hasil keuangan pada 11 Instansi organisasi distribusi penyebaran kuesioner:

Tabel 1 Data Instansi/ Dinas

No	Instansi	Responden	
		Adm. Umum	Keuangan
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2	3
2.	Dinas Pariwisata	1	5
3.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	5
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	4
5.	Dinas Perhubungan	1	5
6.	Dinas Pekerjaan Umum	2	3
7.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	5
8.	Dinas Kesehatan	2	5

9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	6
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	3
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3	4

Sumber: Data yang diolah, 2017

2. Hasil Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis diskriptif dan analisis regresi linear berganda

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Presentase
Jenis kelamin	Pria	40	58,53%
	Wanita	28	41,17%
	Total	68	100%

Sumber: Data yang diolah, 2017

Hasil distribusi jenis kelamin dari 68 responden diketahui bahwa 58,53% atau 40 orang responden berjenis kelamin laki-laki, dan 41,17% atau 28 orang responden berjenis kelamin perempuan.

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Presentase
Umur	20- 29	13	19,11%
	30- 39	18	26,47%
	40- 49	18	26,47%
	50- 59	19	27,95%
	Total	68	100%

Sumber: data yang diolah, 2017

Hasil distribusi umur dari 68 responden diketahui bahwa umur 20-29 dengan presentase 19,11% berjumlah 13 orang, umur 30-39 dengan presentase 26,47% berjumlah 18 orang, umur 40-49 dengan presentase 26,47% berjumlah 18 orang, umur 50-59 dengan presentase 27,94% berjumlah 19 orang.

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

A. Karakteristik	Kategori	Jumlah	Presentase
Pendidikan	SMA	26	38,24%

	D3	10	14,70%
	S1	25	36,77%
	S2	7	10,29%
	Total	68	100%

Sumber: data yang diolah, 2017

Hasil distribusi pendidikan terakhir dari 68 responden diketahui bahwa 38,24% atau 26 orang responden berpendidikan SLTA, SMK dan SMEA, 14,70% atau 10 orang responden berpendidikan D3 jurusan Administrasi Negara, Akuntansi, Teknik Sipil, Informatika, Gizi, 36,77% atau 25 orang responden berpendidikan S1 jurusan Pertanian, Peternakan, Akuntansi, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Ekonomi Pembangunan, Ilmu Kelautan, Pendidikan, Kesehatan dll, dan 10,29% atau 7 orang responden berpendidikan S2 jurusan Teknik Sipil, Magister Manajemen, Pertanian, Administrasi Publik.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 13,466 + 1,102X_1 + 0,288X_2 + 1,343X_3 + 0,180X_4 - 0,554X_5 + \varepsilon$$

Y = Kualitas Informasi Akuntansi
 $13,466$ = Konstanta
 X_1 = Informasi yang relevan
 X_2 = Informasi yang terpercaya
 X_3 = Informasi yang lengkap
 X_4 = Informasi yang tepat waktu
 X_5 = Informasi yang dimengerti
 ε = Error

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Unstandardized Coefficient		t hitung	Sig	Keterangan
	B	Std. Error			
Konstanta (Constant)	13,446	5,244	2,574	0,012	Signifikan
Relevan (X1)	1,102	0,260	3,889	0,000	Signifikan
Terpercaya (X2)	0,288	0,284	1,103	0,315	Tidak Signifikan
Lengkap (X3)	1,343	0,302	4,448	0,000	Signifikan
Tepat Waktu (X4)	0,554	0,298	0,864	0,574	Tidak Signifikan
Dimengerti (X5)	-0,554	0,298	-1,854	0,068	Tidak Signifikan

Sumber: data yang diolah, 2017

a. Hasil Uji t (Parsial)

1. Informasi yang relevan menunjukkan hasil t sebesar 3,889 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial informasi yang relevan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Terdapat nilai sig sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0,05 atau nilai $0,000 < 0,5$ maka dapat bahwa H1: Pengaruh informasi yang relevan terhadap kualitas informasi akuntansi **terdukung**.
2. Informasi yang terpercaya menunjukkan hasil t sebesar 1,103 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial informasi yang terpercaya tidak berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Terlihat pada tabel 8 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,315. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0,05 atau nilai $0,315 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H2: pengaruh informasi yang tepat waktu terhadap kualitas informasi akuntansi tidak **terdukung**.
3. Informasi yang lengkap menunjukkan hasil t sebesar 4,448 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial Informasi yang lengkap berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Terlihat pada tabel memiliki nilai

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05 atau nilai $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H3: Pengaruh informasi yang lengkap terhadap kualitas informasi akuntansi **terdukung**.

4. Informasi yang tepat waktu menunjukkan hasil t sebesar 0,565 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial informasi yang tepat waktu berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Terlihat pada tabel memiliki nilai signifikansi sebesar 0,574. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0,05 atau nilai $0,574 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H4: pengaruh informasi yang tepat waktu terhadap kualitas informasi akuntansi **tidak terdukung**.

5. Informasi yang dimengerti menunjukkan hasil t sebesar -1,857 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial informasi yang dimengerti tidak berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Terlihat pada tabel memiliki nilai signifikansi sebesar 0,680. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0,05 atau nilai $0,680 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H5: informasi yang lengkap berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi **tidak terdukung**.

b. Hasil Uji F

Uji F (simultan digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	F _{hitung}	Sign.
Regression	1637,198	28,140	0,000
Residual	721,434		
Total	2358,632		

Sumber: Data yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F sebesar 28,140 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa H₀ ditolak dan H_a didukung karena nilai 0,000 < 0,05. Artinya informasi relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu dan dimengerti bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi.

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi dengan menunjukkan besarnya variabel independen informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu, dan dimengerti secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen kualitas informasi akuntansi. Hasil pengujian koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel 9 dibawah ini:

Tabel 10. Hasil Uji R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate
1	0,833	0,694	0,669	3,441

Sumber: data yang diolah, 2017

Pada tabel 10 nilai R Square menunjukkan angka 0,669. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu dan dapat dimengerti terhadap variabel kualitas informasi akuntansi adalah sebesar 66,9%.

PEMBAHASAN

Pengaruh informasi yang relevan terhadap kualitas informasi akuntansi.

Hasil pengujian hipotesis 1 yaitu informasi yang relevan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa informasi yang relevan dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 11 Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memberikan informasi yang relevan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rusnanto (2016) bahwa informasi yang relevan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi pada rumah sakit. Informasi dikatakan relevan apabila memiliki manfaat, menambah pengetahuan atau nilai bagi parapengambil keputusan, untuk mengurangi ketidakpastian (Aditya, 2014).

Pengaruh informasi yang terpercaya terhadap kualitas informasi akuntansi.

Hasil pengujian hipotesis 2 yaitu informasi yang terpercaya secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa informasi yang terpercaya dengan tingkat signifikansi $0,351 < 0,05$. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 11 Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memberikan informasi yang terpercaya. Perlu diperhatikan agar Informasi akuntansi pada 11 Instansi tidak

bergantung pada keinginan pada keinginan pihak tertentu.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2014) bahwa terpercaya berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi pada rumah sakit. Informasi yang terpercaya harus terbebas dari kesalahan dan bias serta akurat menjelaskan kejadian atau aktivitas (Romney dalam Windarsono, 2007). Informasi yang terpercaya harus bias di pertanggungjawabkan dan diperoleh dengan cara yang benar dan didistribusikan dengan cara yang benar.

Pengaruh informasi yang lengkap terhadap kualitas informasi akuntansi.

Hasil pengujian hipotesis 3 yaitu informasi yang lengkap secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa lengkap dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 11 Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memberikan informasi yang lengkap, memuat aspek-aspek penting yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rusnanto (2016) bahwa informasi yang lengkap berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi pada rumah sakit.

Pengaruh informasi yang tepat waktu terhadap kualitas informasi akuntansi.

Hasil pengujian hipotesis 4 yaitu informasi yang tepat waktu secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa informasi yang tepat waktu dengan tingkat signifikansi $0,574 > 0,05$. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 11 Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memberikan informasi yang tepat waktu, ini di tujukan pada indikator pembaharuan informasi dan sistematis dan keteraturan waktu penyampaian informasi reponden menjawab netral.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Windarsono (2004) bahwa informasi yang tepat waktu berpengaruh terhadap kualitas informasi manajemen. Informasi harus disampaikan secepat mungkin pada saat pengambilan keputusan agar dapat membantu pengambilan keputusan dan tertundanya pengambilan keputusan. Informasi juga harus terbebas dari kesalahan yang material (Aditya, 2014)

Pengaruh informasi yang dimengerti terhadap kualitas informasi akuntansi.

Hasil pengujian hipotesis 5 yaitu informasi yang dimengerti secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa informasi yang dimengerti dengan tingkat signifikansi $0,680 > 0,05$. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 11 Instansi Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) belum memberikan informasi yang mudah dimengerti, sesuai dengan batas pemahaman, bentuk dan istilah yang disesuaikan bagi penggunaannya. Apabila pihak instansi memberikan informasi yang dapat dimengerti akan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rusnanto (2014) bahwa informasi yang dimengerti berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi pada rumah sakit.

Pengaruh informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu, dan dimengerti berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi akuntansi.

Hasil pengujian hipotesis 6 yaitu pengaruh informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu, dan dimengerti berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi akuntansi. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa informasi yang informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu, dan dimengerti dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 11 Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memberikan informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu dan dimengerti.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Aditya (2014) bahwa informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu dan dimengerti berpengaruh simultan terhadap kualitas informasi akuntansi. Romney (2006) menjelaskan bahwa ada

beberapa faktor kualitas informasi akuntansi yaitu *relevant, reliable, complete, timely,* dan *understandable*.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Faktor- faktor kualitas informasi akuntansi yaitu, informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu dan dimengerti. Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pengujian secara parsial dengan nilai signifikansi 5% informasi yang relevan dan lengkap berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi. Sedangkan informasi yang terpercaya, tepat waktu dan dimengerti tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi.
- b. Pengujian secara simultan dengan nilai signifikansi 5% informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu dan dimengerti berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi.
- c. Berdasarkan uji koefisien determinasi (R^2) dibuktikan bahwa informasi yang relevan, terpercaya, lengkap, tepat waktu dan dimengerti terhadap variabel kualitas informasi akuntansi 66,9% sedangkan 33,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar pembahasan ini.

Implikasi

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa implikasi bagi berbagai pihak yang terkait

dengan kualitas informasi akuntansi antara lain:

Bagi penulis, memberikan bukti empiris mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Selain itu sebagai sarana menerapkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan khususnya pada Informasi Akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gunungkidul secara langsung.

Bagi Instansi, untuk menunjang pekerjaan setiap karyawan sehingga Instansi dapat menerapkan informasi akuntansi yang tepat dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai informasi akuntansi.

Bagi peneliti lain, dapat dijadikan bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang ada dalam penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

- a. Perlunya memperluas obyek penelitian, tidak hanya 11 Instansi saja sehingga lebih dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan tidak terbatas pada penyebaran kuesioner saja. Perlu ditambahkan metode wawancara, untuk menghindari kemungkinan bias atau tidak obyektif dari responden dalam pengisian kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, S. A. 2014. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi Pada RSUD Ungaran. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Fridayani, Devani. 2012. "Pengaruh Kompetensi dan Pertimbangan Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Bukti Audit yang Dikumpulkan (Studi Kasus Pada BUMN yang Berpusat di Bandung)". Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS". Semarang:BP Universitas Diponegoro.
- Indriani, R dan Khoriyah, W. 2010. "Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Informasi Asimetri". *Jurnal SNA XIII*. Purwokerto.
- Jogiyanto, HM. 1999. "Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis". ANDI Yogyakarta: Yogyakarta.
- _____. 2003. "Sistem Informasi Berbasis Komputer: Konsep Dasar dan Komponen. Edisi 2. Yogyakarta : BPFE. Yogyakarta.
- Kadir, Abdul. 2003. "Pengenalalan Sistem Informasi". Andi Offset: Yogyakarta.
- Mulyanto , Agus. 2009. "Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi". Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- _____. 2015. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- _____. 2003. Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Romney B. Marshall. 2006. "Accounting Information System". Salemba Empat: Jakarta.
- Rusnanto, Galeh. 2016. "Analisis Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Rumah Sakit eks- Karisidenan Surakarta)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)". Alfabeta: Bandung.
- Windarsono, Agus. 2007. "Pengaruh Kualitas Informasi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial". Hal: 286-299. Vol. 2, No. 2. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

**PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta)

Teguh Erawati, Muhammad Firas Abdulhadi

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Jl. Kusumanegara No.121, Umbulharjo, Yogyakarta

eradimensiarch@gmail.com, muh.firasabdulhadi@gmail.com

ABSTRACT

The research is to examine the influence of the understanding of local financial accounting system, capacity of human resource and the utility of information technology toward the quality of financial report information of yogyakarta government.

The used data for the research is primer data. It is the result from questionnaires spreading. The response of this research is manager of financial report of yogyakarta local government. The questionnair is spread to 90 respondents, meanwhile that can be proccesd are 63 questionnaires. The method of sample taking is using purposive sampling. Analytic technique of data in this research is using double linier regretion technique.

The result of regretion test shows that the local government financial accounting system understanding and the capacity of human resource are not influenced significantly to the quality of local government financial report information, meanwhile the utility of technology is influenced positively to the quality of local government financial report information.

keyword: the understanding of local financial accounting system, capacity of human resource, the utility of information technology and quality of local government financial report information.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah selaku tokoh utama dalam penyajian laporan keuangan yang akan dipublikasi ke masyarakat harus bersifat terbuka dan memiliki kebenaran yang valid sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memahaminya. Oleh karena itu diperlukan suatau pelaporan yang bersifat akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka memuaskan kebutuhan para pengguna laporan keuangan dan dapat

menciptakan otonomi daerah yang akurat (Darmawan, 2014).

Menurut Pemandagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan, (Darmawan 2014; Wardani & Andriyani, 2017).

Baridwan (2004) menegaskan bahwa tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Wardani & Andriyani, 2017).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah

diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Opini Tidak Wajar (TP), dan (4) Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Sedangkan menurut Bastian (2011: 194) terdapat lima jenis pendapat yang diberikan oleh auditor (1) pendapat wajar tanpa pengecualian, (2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas, (3) pendapat wajar dengan pengecualian, (4) pendapat tidak wajar, dan (5) pernyataan tidak memberikan pendapat.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda DIY pada tahun 2015 mendapat pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk hasil pemeriksaan LKPD dari Tahun Anggaran 2015-2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (<http://www.bpk.go.id>).

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak penyimpangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah belum semua memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan (Indriasari dan Ertambang, 2008). Sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang tersedia di pemerintah daerah belum sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai. Penempatan sumber daya manusia di beberapa sub bagian dan/atau bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) tidak sesuai antara latar belakang pendidikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dikerjakan. Akibat dari keterbatasan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, tanggungjawab dari para pengelola keuangan menjadi lebih berat untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang akuntansi akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010; Wardani & Andriyani, 2017).

Pengelolaan keuangan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama karena ketidak seragaman format laporan keuangan dan kemungkinan tingkat kesalahan penyajian laporan keuangan lebih tinggi. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong setiap pemerintah daerah untuk ikut serta memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi menggunakan jaringan internet maupun jaringan intranet untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan untuk menyeragamkan laporan keuangan antar SKPD (Roshanti dkk, 2014; Wardani & Andriyani, 2017).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah

berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Wardani & Andriyani, 2017).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, (Pradono, 2010)

Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu kemampuan seseorang staf/pegawai untuk menyusun suatu bentuk pelaporan akuntansi yang meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur aset

tetap/ barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas (Winanti, 2014).

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil (Zuliarti, 2012; Wardani & Andriyani, 2017).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahwuni, 2013:2). Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, bahkan CD ROM, sedangkan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh (Kadir dan Triwahwuni, 2013:3). Menurut Wahyudi (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Wardani & Andriyani, 2017).

Kualitas Informasi

Huang, *et al.*(1999) dalam Lillrank (2003) mendefinisikan 15 dimensi kualitas informasi yang dikelompokkan menjadi empat kelas:

- 1) Kualitas intrinsik: akurasi, obyektivitas, believability, dan reputasi,
- 2) Kualitas aksesibilitas: akses, dan keamanan,
- 3) Kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, kelengkapan dan jumlah data, dan
- 4) Kualitas representasi: interpretasi, kemudahan pemahaman, representasi ringkas, dan perwakilan konsisten.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan.
2. Andal.
3. Dapat dibandingkan.
4. Dapat dipahami.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Hubungan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2006) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

H1 : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dengan Kualitas Informasi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi yang memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan tidak akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian akuntansi yang memadai akan mampu menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Penelitian Indriasih dan Poppy (2014) menunjukkan bahwa kompetensi aparat pemerintah daerah memiliki efek pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia mempunyai hubungan positif terhadap keterandalan laporan keuangan, semakin kualitas sumber daya manusia terampil dan mempunyai keahlian dibidang akuntansi, semakin baik andal laporan keuangan yang dihasilkan (Wardani & Andriyani, 2017).

Upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur ini masih belum dapat dikelola dengan baik. Hal itu ditunjukkan antara lain oleh masih sulitnya mengubah cara pikir (*mindset*) dan cara kerja aparatur, masih rendahnya disiplin dan etika pegawai, sistem karier yang belum sepenuhnya berdasarkan prestasi kerja, sistem remunerasi yang belum memadai untuk hidup layak, rekrutmen yang belum dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja, lemahnya pengawasan dan audit terhadap kinerja aparatur, dan sistem

informasi manajemen kepegawaian yang belum berfungsi secara optimal (Bappenas, 2007).

H2 : Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap KualitaS Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hubungan Pemanfaatan Teknologi dengan Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teknologi Informasi (TI) merupakan sarana dalam menyebarkan berbagai informasi yang menyangkut dalam berbagai hal di antaranya dalam rangka penyebaran informasi kepada pengguna informasi laporan keuangan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada

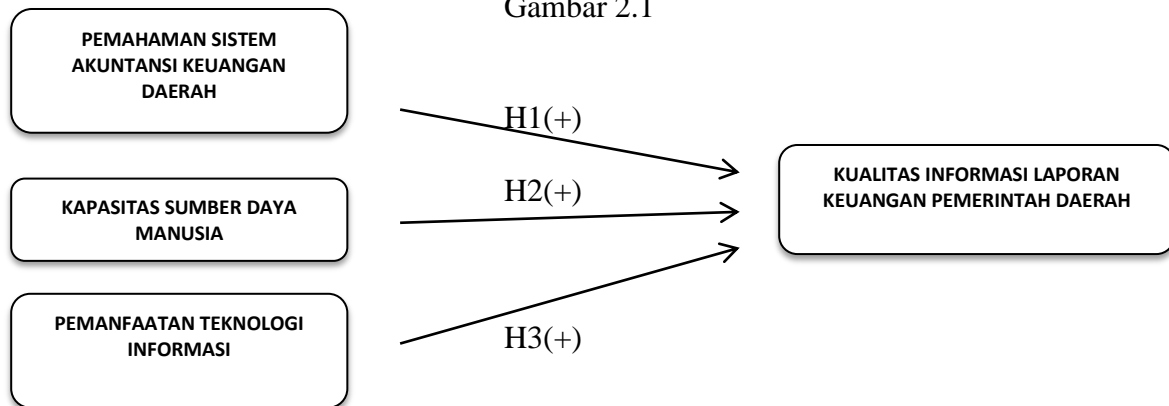
pelayanan publik (Wardani & Andriyani, 2017).

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. (Indriasari, 2008; Wardani & Andriyani, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kerangka Pikir

Gambar 2.1



METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta, yaitu salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang berupa Dinas-Dinas.

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data primer penelitian yang akan dilakukan bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011 dalam Sari 2016) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Data primer dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, dan penjelasan atau gambaran umum organisasi serta data jumlah pegawai bagian keuangan pada masing-masing Dinas.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini yaitu SKPD Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta, yaitu salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang berupa Dinas-Dinas. Dari populasi tersebut, peneliti akan menggunakan pengambilan sampel dengan metode kuesioner. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian atau dipilih berdasarkan kriteria. Sampel dalam penelitian ini adalah SKPD yang berada di Wilayah Balaikota Daerah Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, sampel dipilih karena ada pada tempat dan waktu yang tepat. Peneliti akan memberikan kuesioner kepada setiap DKPD yang berada di lingkup Balaikota, Kota Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Alat uji yang digunakan adalah *Regresi Linear Berganda*. Uji digunakan karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Stastistik dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian antara *mean*, *nilai minimum*, *nilai maksimum* dan *standar deviasi*. Hasil stastistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1
Hasil Tabel Statistik Deskriptif

		<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Devition</i>
Kualitas Laporan	Informasi Keuangan	63	24	39	30.89	3.111

Pemerintah Daerah						
Pemahaman Sistem Informasi Keuangan	Sistem Laporan	63	18	38	27.10	4.703
Kapasitas Daya Manusia	Sumber	63	11	27	20.70	3.762
Pemanfaatan Teknologi		63	21	35	27.19	2.639

Sumber: data diolah 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui jumlah data (N) sebesar 63. Nilai minimum kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 24, nilai maksimum sebesar 29, rata-rata kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 30.89 dan standar deviasi sebesar 3.111. Hal ini sebagian responden menjawab setuju untuk pernyataan yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan.

Nilai minimum pemahaman informasi laporan keuangan sebesar 18, nilai maksimum 38, rata-rata pemahaman sistem informasi laporan keuangan sebesar 27.10 dan standar deviasi sebesar 4.703. Hal ini berarti sebagian responden menjawab setuju dalam hal pemahaman sistem informasi.

Nilai minimum kapasitas sumber daya manusia sebesar 11, nilai maksimum sebesar 27, rata-rata kapasitas sumber daya manusia sebesar 20.70 dan standar deviasi sebesar 3.762. Hal ini berarti sebagian responden menjawab setuju untuk pernyataan yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia.

Nilai minimum pemanfaatan teknologi sebesar 21, nilai maksimum sebesar 35, rata-rata pemanfaatan teknologi sebesar 27.19 dan standar

deviasi sebesar 2.639. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden setuju dalam hal pemanfaatan teknologi.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan statistic *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini menghasilkan koefisien *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,494 dengan nilai signifikan (*Asym.s 2-tailed*) sebesar 0,967. Hal tersebut menunjukkan bahwa signifikan lebih dari 0,05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat asumsi normalitas pada model regresi penelitian ini. Uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa secara statistik berarti variabel tidak berpengaruh secara signifikan statistik karena *p-value* lebih besar dari 0,05 berarti variabel tersebut bebas heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Demikian pula dengan uji multikolinieritas menghasilkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan, sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas(Ghozali, 2011:105).

**Hasil Regresi Linier Berganda
Uji Simultan (Uji Statistik F)**

**Tabel 2
Hasil Uji Statistik F**

Model	Sun Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	240.265	3	80.088	13.127	.000
Residual	359.957	59	6.101		
Total	600.222	62			

Sumber : data diolah, 2017

Hasil dari pengolahan F tabel adalah sebesar 2,76 yang dilihat pada daftar F tabel. Dalam hal ini menunjukkan bahwa F hitung sebesar 13.127 > F tabel sebesar 2,76 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,050 sehingga ketiga variabel independen yaitu pemahaman sistem akuntansi, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kualitas informasi laporan keuangan yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji statistik t pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara signifikan. Jika *Probabilitas sig.* < 0,05 dan t hitung > t tabel maka Ha diterima Ho menolak. Jika *Probabilitas sig.* > 0,05 dan t hitung < t tabel maka Ho diterima Ha menolak. Pada uji statistik uji t tabel didapatkan dengan rumus dimana $df=n-k-1= 63-4-1=58$, maka t tabel=1,67109. Berikut ini hasil uji stastistik t.

**Tabel 3
Hasil Uji Statistik T**

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1 (Constant)	10.322	3.382		3.052	.003
Pemahaman Sistem Akuntansi	.039	.098	.060	.403	.688
Kapasita Sumber Daya Manusia	-.024	.123	-.029	-.193	.847
Pemanfaatan Teknologi	.735	.126	.624	5.853	.000

a. *Dependen Variabel Kualitas Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Sumber : data diolah, 2017

Dari tabel di atas dapat dibentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = 10.322 + 0,039X1 + (-0,024X2) + 0.735X3 + e$$

a. **Hipotesis 1 : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).**

Berdasarkan tabel 3 menyatakan bahwa variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai tingkat signifikan sebesar 0.688 dan t hitung 0.403. berarti tingkat signifikan lebih besar dari 0.05 ($0.688 > 0,05$) dan t hitung < t tabel ($0.403 < 1,67109$). Hal ini menyatakan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak.

b. Hipotesis 2 : Kapasitas Sumber Daya Manusia(X2) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan tabel 3 menyatakan bahwa variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tingkat signifikan sebesar 0.847 dan t hitung -0.193. berarti tingkat signifikan lebih besar dari 0.05 ($0.847 > 0,05$) dan t hitung < t tabel ($-0.193 < 1,67109$). Hal ini menyatakan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak.

c. Hipotesis 3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Berdasarkan tabel 3 menyatakan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai tingkat signifikan sebesar 0.000 dan t hitung 5.853. berarti tingkat signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0.000 > 0,05$) dan t hitung > t tabel ($5.853 > 1,67109$). Hal ini menyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633	.400	.370	2.470

Sumber : data diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tabel 4 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,370 artinya besarnya pengaruh dari pemahaman sistem akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 37,0%. Sisanya sebesar 63,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Simpulan

1. Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,
2. Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
3. Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pemahaman sistem akuntansi, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

1. Menambahkan variabel penelitian yang diduga dapat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Menambahkan populasi responden agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam meneliti.
3. Lebih memperhatikan indikator-indikator yang akan di jadikan butir pernyataan dikarenakan dalam pengujian *pilotest* dalam penelitian ini satu indikator dihilangkan yaitu pendidikan terakhir di karenakan banyak butir pernyataan yang berhubungan dengan pendidikan terakhir yang tidak valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyantini, sujana dan darmawan. 2014. *Pengaruh pengalaman auditor, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap audit judgement*. E-Jornal S1 ak universitas pendidikan ganesha, vol.2 no.1
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta; BPFE
- Bastian, Indra. 2011. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- <http://www.bpk.go.id>.
- Huang, *et al.* 1999 dalam Lillrank, Paul. 2003. "The Quality of Information", International Journal of Quality & Reliability Management Vol. 20 No. 6 pp. 691-703.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo . 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*, Simposium Nasional Akuntansi XI. 23 - 24 Juli. Pontianak.
- Indriasih, Dewi dan Poppy Sofia Koeswayo. 2014. *The Effect f Government Apparatus Competence and The Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting and Its Impact on the Performance Accountability in Local Government*. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. Vol. 5 Issue I.
- Kadir, A. dan T. Ch. Triwahyuni. 2013. *Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Lillrank, Paul. 2003. "The Quality of Information", International Journal of Quality & Reliability Management Vol. 20 No. 6 pp. 691-703.
- Pemendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- Pemerintah No. 56 Tahun 2005. *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pradono, Basukianto. 2010, *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Faktor Yang Mempengaruhi dan Implementasi Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2015, Hal. 188 – 200 Vol. 22, No. 2 ISSN: 1412-3126.
- Roshanti, dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Volume 2, No. 1.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang No.15 Tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Wahyudi, Johan. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pengendalian Internal Akuntansi Sebagai Intervening*. Skripsi (tidak diterbitkan). IKIP Mataram.
- Wardani, Dewi Kusuma & Ika Andriyani. 2017. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, halaman 88-98
- Wini, Winidyaningrum, Celviana & Rahmawati. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukomonosraten)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.
- Winanti, Sri dan Nila Aprila. 2014. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelatihan, Dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Universitas Muria Kudus.Kudus.

KETENTUAN PENULISAN NASKAH JURNAL

Artikel yang ditulis untuk dimuat dalam Jurnal Akuntansi dan Manajemen adalah hasil penelitian dalam bidang Akuntansi dan Manajemen. Artikel diketik dengan huruf Time New Roman, ukuran 12 pts, spasi ganda, dicetak di atas kertas HVS ukuran kuarto, sebanyak 25 halaman dan diserahkan dalam bentuk print out 2 eksemplar beserta *soft copy*. Pengiriman *soft copy* juga dapat dilakukan melalui *e-mail* ke alamat : akmenika@upy.ac.id.

1. Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik dengan nama, alamat lembaga, dan alamat *e-mail*. Jika penulis terdiri dari dua orang atau lebih, alamat *e-mail* hanya untuk penulis pertama.
2. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan format esai. Judul artikel diketik dengan huruf kapital, ukuran 14 pts, tercetak tebal (bold), dengan posisi *center*.
3. Bila penulis mencantumkan tabel, maka garis yang tercetak pada tabel hanya garis mendatar batas atas, garis mendatar batas judul kolom dengan isi tabel, dan garis mendatar batas bawah. Bila baris terakhir isi tabel berupa penjumlahan bilangan, maka di samping garis mendatar batas bawah juga perlu garis mendatar batas penjumlahan bilangan tersebut. Nomor dan judul tabel tertulis di atas tabel dengan bernomor urut mulai tabel 1 dan seterusnya. Contoh: **Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Domestik, dan Ekspor...** (Nomor dan Judul Tabel dicetak tebal). Sumber data diletakkan di bawah tabel sebelah kiri.
4. Sistematika artikel adalah sebagai berikut:
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Alamat Lembaga
 - Alamat *e-mail*
 - *Abstract* (ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ditulis dalam satu paragraph, maksimum 200 kata). *Abstract* berisi tujuan penelitian, metode, alat analisis data, hasil penelitian dan *keywords*.
 - Pendahuluan (tanpa judul) berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan hipotesis
 - Metode berisi populasi, sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data
 - Hasil Penelitian dan Pembahasan
 - Simpulan
 - Daftar Pustaka (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk)
5. Sumber referensi sedapat mungkin hasil tulisan 10 tahun terakhir. Referensi yang diutamakan adalah berupa artikel-artikel hasil penelitian yang ditulis dalam jurnal, majalah ilmiah, internet dan laporan penelitian (termasuk disertasi, tesis, dan skripsi).
6. Perujukan dan pengutipan pendapat atau definisi menggunakan teknik rujukan berkurung (nama, tahun: halaman). Contoh: Ekuitas *merk* adalah.... (Kotler dan

Keller, 2012:25) atau Menurut Kotler dan Keller (2012:25) ekuitas *merk* adalah..... Penulisan sumber pada kutipan tak langsung menggunakan kata “dalam”. Contoh: Menurut *The American Marketing Association* (dalam Kotler dan Amstrong, 2011:35) pemasaran adalah.....,Perujukan dari hasil penelitian tidak perlu menunjuk halaman. Contoh: menurut penelitian Chandra (2010) citra *merk* berpengaruh terhadap kepuasan konsumen,.....

7. Daftar Pustaka disusun secara Alfabetis

Buku:

Ross, Stephen A, Randolph W. Westerfiled, Jeffrey, Jaffe & Bradford D. Jordan. 2008. *Modern of Financial Management*. Eighth Edition. New York: McGraw-Hill Irwin.

Buku Kumpulan Artikel:

Saukah, A. & M.G. Waseso (Eds.). 2002. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah* (edisi ke-4, cetakan ke-1), Malang: UM Press.

Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel:

Butler, Timothy & James Waldrood. 1999. Seni Merancang pekerjaan. Dalam Dewi, Ike Janita (Ed.), *Maximum Motivation: Konsep & Implikasi Manajerial dalam Memotivasi Karyawan* (hlm. 99-123). Yogyakarta: Penerbit Santusta.

Artikel dalam Jurnal atau Majalah:

Pettigrew, Andrew M, Richard W. Woodman & Kims Cameron. 2001. “*Studying Organizational Change and Development: Challengers for Future research*”. *The Academic of Management Journal*, Vol.44 (august): 679-750.

Artikel dalam Surat Kabar:

Prasetyantoko, A. 20 Oktober 2008. *Kembalinya Pendulum Perdagangan*. Kompas, hlm.6.

Tulisan/berita dalam Surat Kabar (tanpa nama pengarang):

Kompas, 28 Maret 2009. *Ekonomi Melambat; Ekspor sudah Merosot 30 Persen*, hlm.4.

Dokumen Resmi:

Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1978. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud.

Buku Terjemahan:

Kotler, Philips & Gary amstrong. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Edisi 12. Jilid 1. Terjemahan oleh Bob Sabran 2008. Jakarta: Erlangga.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Putri, Melania Intan. 2009. *Analisis Pengaruh kualitas Jasa perawatan Kecantikan terhadap Kepuasan dan Loyalitas pelanggan: Studi Kasus pada Pelanggan*

Klinik Perawatan kecantikan Larissa Skin Care & Hair Treatment Yogyakarta. Skripsi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: FE USD.

Makalah Seminar, Lokakarya, Penataran:

Saptaningsih S., Lilik W. 2012. *Peningkatan Daya Saing Yogyakarta dari Perspektif Kepariwisata dan Ekonomi: dari Masa ke Masa*. Makalah disajikan pada Seminar Ilmiah dengan Tema “meningkatkan Daya Saing Yogyakarta” dalam rangka Dies Natalis ke-30 Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, 20 Desember 2012.

Internet (artikel dalam jurnal online):

Wuri, Josephine. 2006. “ *Lembaga Penjamin Simpanan: Strategi Mengatasi Bank Rush*” *Jurnal Akuntansi dan manajemen: Antisipasi*. (online), Vol.5, No. 1, (<http://www.ekonomi.upy.ac.id>, diakses 20 januari 2013).

8. Nomor dan judul gambar/bagan/grafik selanjutnya disebut gambar, ditulis di bawah gambar dengan posisi *center*. Sumber data di tulis di bawah gambar sebelah kiri.
9. Nomor dan judul Tabel ditulis di atas Tabel dengan posisi *center*. Sumber data ditulis di bawah *table* sebelah kiri.
10. Semua naskah ditelaah secara anonym (*blind review*) oleh mitra bebestari yang ditunjuk oleh penyunting menurut kepakarannya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk memperbaiki naskahnya, jika naskah artikel layak dimuat tetapi masih perlu direvisi atas dasar saran dari mitra bebestari atau penyunting jurnal. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis.
11. Naskah artikel yang sudah dicetak dalam bentuk cetak coba, dapat dibatalkan pemuatannya oleh penyunting jika diketahui bermasalah.
12. Naskah artikel yang tidak dimuat di jurnal tidak dikembalikan ke penulis, kecuali ada permintaan dari penulis.
13. Segala sesuatu yang menyangkut masalah perijinan, pengutipan atau penggunaan *software computer* untuk pembuatan naskah, pengolahan data dan hal lain yang terkait dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis artikel.